



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019

**Jalan Basuki Rahmat No. 24 Teluk Betung Utara
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019 dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan rekam jejak sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama Tahun 2019. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan menggambarkan kondisi Peradilan Agama se-Provinsi Lampung termasuk Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Akreditasi Penjaminan Mutu, Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengawasan meliputi Pengawasan Internal dan Evaluasi serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang memiliki 14 Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung, pada tahun 2019 cukup banyak kemajuan yang dicapai baik fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dilihat dari laporan pelaksanaan kegiatan ini. Laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai ikhtiar memberikan informasi mengenai capaian-capaian atas Program Kerja Tahun 2019 beserta segenap kendala yang dihadapi.

Semoga laporan pelaksanaan kegiatan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perencanaan pada tahun berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 08 Januari 2020
Ketua,

dto

Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II KEADAAN PERKARA	15
A. Keadaan Perkara Peradilan Agama	15
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	15
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	17
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)	23
B. Penyelesaian Perkara	25
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	27
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	31
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	33
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	34
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	35
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	35
1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	35
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	36
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	38
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	41
A. Sumber Daya Manusia	41
1. Mutasi	62
2. Promosi	63
3. Pensiun	63
4. Diklat	64
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	64
A. Pengelolaan Keuangan	64
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	74



C. Pengelolaan Teknologi Informasi	106
1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Agama	106
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama	109
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	114
A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).....	114
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	115
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	118
BAB VI PENGAWASAN	120
A. Pengawasan Internal	120
B. Evaluasi.....	122
BAB VII PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Rekomendasi.....	124



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan salah satu institusi yang merupakan kawal depan (*Voor Post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Banding selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di propinsi Lampung berdasarkan pasal 49,51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung dan di Jambi. wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah propinsi Lampung yang terdiri dari 14 (Empat Belas) wilayah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pengadilan Agama Kelas Tanjung Karang kelas IA
2. Pengadilan Agama Kelas Metro kelas IA
3. Pengadilan Agama Kalianda kelas IB
4. Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas IB
5. Pengadilan Agama Pringsewu kelas IB
6. Pengadilan Agama Kotabumi kelasII
7. Pengadilan Agama Tulang Bawang kelasII
8. Pengadilan Agama Blambangan Umpu kelasII
9. Pengadilan Agama Krui kelas II
10. Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II
11. Pengadilan Gedong Tataan Kelas II
12. Pengadilan Tulang Bawang Tengah Kelas II
13. Pengadilan Sukadana Kelas II
14. Pengadilan Mesuji Kelas II

Dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang notabene merupakan perwujudan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Mahkamah Agung RI mencanangkan “Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia” yang kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, merupakan arah strategi reformasi birokrasi yang mengacu



pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi yang merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Tiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah : 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

A. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah

1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

3. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

4. Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

5. Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses

yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

6. SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

7. Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam buku cetak biru pembaruan peradilan 2010 – 2035, secara ideal badan peradilan yang agung adalah badan peradilan yang:



1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan; dan
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu.

Respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama berkaitan perubahan atau pembaruan melalui beberapa kebijakan diantaranya :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2011 Tentang Tim Reformasi Mahkamah Agung RI; dan
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan instansi di bawah Mahkamah Agung RI menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se-Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor : 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas pembaruan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepatwaktu;
2. Manajemen informasi publik;
3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;
4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasi dipengadilan;
5. Pelayanan peradilan yang prima;
6. Implementasi SIPP Plus guna otomatisasi PolaBindalmin;
7. “Justice for All” dengan paket kegiatan:
 - a. Pelayanan Perkara Prodeo
 - b. Pelayanan Sidang Keliling
 - c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
8. Pengawasan.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai kawal depan (*voor- post*) Mahkamah Agung RI, secara umum gerak dan langkah serta arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, diarahkan pada upaya mewujudkan organisasi/ lembaga pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan menjadikan dan memperhatikan 8 (Delapan) Area Perubahan sebagai arah perubahan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung.

B. PROGRES KINERJA PTA BANDAR LAMPUNG DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA BANDAR LAMPUNG

1. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah “Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung”. Sedangkan Misi yang dilaksanakan yakni :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai supporting unit seluruh kegiatan pelaksanaan peradilan.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019. Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, perlu dilakukan reviu secara berkala terhadap IKU.

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dilaksanakanlah review terhadap IKU Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

3. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Bidang Teknis Yustisial
 1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga teknis (Hakim, Panitera / Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti) secara berkelanjutan; dan
 2. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara.
- b. Bidang Non Teknis Yustisial
 1. Melaksanakan Manajemen Peradilan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 2. Memanfaatkan akses perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- c. Bidang Administrasi Umum
 1. Meningkatkan Pelaporan Keuangan dan asset dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Mahkamah Agung RI ; dan
 2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan input data melalui aplikasi SIKEP, ABS, SAPK, KOMDANAS, SIMAK- BMN, RKA-KL, SAKPA, JDIH, dll;
 3. Mengoptimalkan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor.144 tahun 2007;
 4. Peningkatan sarana Teknologi Informasi;
 5. Peningkatan sarana meliputi Pembangunan/perluasan gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
 6. Membuka akses Teknologi Informasi dengan program Finger Scan, Touch



Screen, dan Hot Spot; dan

7. Melaksanakan rapat rutin pada setiap unit kerja.

Tujuan Rencana Strategis adalah:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama & badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas;
4. Pelayanan Peradilan Agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
5. Tenaga Teknis yang berkualitas, dan professional;
6. Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan Peradilan Agama; dan
7. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi peradilan agama.

Tabel 1.2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2015-2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	96%	97%	97%	97%	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	96%	97%	97%	97%	98%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	a. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: b. Kasasi Peninjauan Kembali	10%	10%	8%	8%	7%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang deregister dan telah di distribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	98%	100%	100%	100%	100%

5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%	92%	93%	94%	95%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	89%	91%	93%	94%	95%
7	Peningkatan Layanan Perkantoran (penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana)	a. Persentase anggaran layanan perkantoran	85%	87%	90%	91%	92%
		b. Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan	75%	76%	78%	80%	85%
		c. Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	80%	85%	85%	87%	90%

D. CAPAIAN KINERJA

Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik demi mewujudkan reformasi birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung. Ini terlihat dari prestasi-prestasi yang telah dicapai selama tahun 2019. Diantara prestasi yang diperoleh adalah:

1. Pada tanggal 19 Desember 2019, Komisi Informasi Provinsi Lampung memberikan Anugerah Peringkat II Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal se-Provinsi Lampung kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung se wilayah Lampung pada tahun 2019 telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A Excellent. Yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Kotabumi, Pengadilan Agama Tulang Bawang, Pengadilan Agama Tanggamus, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Krui, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Kalianda, Pengadilan Agama Pringsewu, sedangkan masih

ada satu Pengadilan Agama Sukadana yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat B. Adapun Akreditasi Penjaminan Mutu ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, sehingga dapat tercipta pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, transparan dan berkeadilan.

3. Pada Tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memperoleh predikat sebagai Satuan Kerja Terbaik I Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2019 kategori Satuan Kerja dengan pagu rendah dan Satuan Kerja Terbaik II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I tahun 2019 Kategori Staker dengan Pagu Tinggi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung.
4. Pada Tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memberikan predikat sebagai Peringkat I Koperasi Berprestasi se kota Bandar Lampung.
5. Pada Tahun 2019, 2 (dua) satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diantara nya:
 1. Pengadilan Agama Tulang Bawang memperoleh predikat sebagai satuan kerja Terbaik Pertama Pengelolaan Keuangan TA 2019, dari KPPN Kotabumi.
 2. Pengadlan Agama Krui memperoleh predikat sebagai Satuan Kerja Peringkat III Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Triwulan II Tahun 2019 dan Terbaik Kelima satker dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan Serta Rekonsiliasi LK Tk Satker Tahun 2019, dari KPPN Liwa.
6. Untuk memberikan pelayanan yang prima dan pelaksanaan “Justice for All”, berkat kerjasama yang baik antara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung dengan Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2019 dapat dilaksanakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu yang kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah. Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu ini merupakan salah satu bentuk pelayanan prima yang memberikan akses kepada masyarakat sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG.

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	201	6	0	207
2.	Masuk Tahun ini	1.954	113	1	2.068
3.	Putus	1.897	106	1	2.004
4.	Sisa Tahun ini	258	13	0	271
B. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	150	6	0	156
2.	Masuk Tahun ini	560	78	0	638
3.	Putus	658	84	0	742
4.	Sisa Tahun ini	52	0	0	52
C. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	122	2	0	124
2.	Masuk Tahun ini	2.158	199	3	2.360
3.	Putus	2.202	199	3	2.404
4.	Sisa Tahun ini	78	2	0	80
D. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	150	1	0	151
2.	Masuk Tahun ini	1.570	243	1	1.814
3.	Putus	1.596	240	1	1.837
4.	Sisa Tahun ini	124	4	0	128

E.	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B				
1.	Sisa Tahun Lalu	128	1	0	129
2.	Masuk Tahun ini	897	271	0	1.168
3.	Putus	999	271	0	1.270
4.	Sisa Tahun ini	26	1	0	27
F.	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II				
1.	Sisa Tahun Lalu	118	6	0	124
2.	Masuk Tahun ini	932	437	0	1.369
3.	Putus	952	433	0	1.385
4.	Sisa Tahun ini	98	10	0	108
G.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II				
1.	Sisa Tahun Lalu	46	3	0	49
2.	Masuk Tahun ini	487	150	0	637
3.	Putus	500	151	0	651
4.	Sisa Tahun ini	33	2	0	35
H.	PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II				
1.	Sisa Tahun Lalu	61	11	0	72
2.	Masuk Tahun ini	547	432	0	979
3.	Putus	477	419	0	896
4.	Sisa Tahun ini	131	24	0	155
I.	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I				
1.	Sisa Tahun Lalu	29	3	0	32
2.	Masuk Tahun ini	454	202	0	656
3.	Putus	429	205	0	634
4.	Sisa Tahun ini	54	0	0	54
J.	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I				
1.	Sisa Tahun Lalu	24	-	0	24
2.	Masuk Tahun ini	581	24	0	605
3.	Putus	583	24	0	607
4.	Sisa Tahun ini	22	0	0	22



K. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	101	-	0	101
2.	Masuk Tahun ini	721	292	0	1.013
3.	Putus	782	290	0	1.072
4.	Sisa Tahun ini	40	2	0	42
L. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	7	0	0	7
2.	Masuk Tahun ini	264	183	0	447
3.	Putus	244	183	0	427
4.	Sisa Tahun ini	27	0	0	27
M. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	37	1	0	38
2.	Masuk Tahun ini	412	76	1	489
3.	Putus	445	77	1	523
4.	Sisa Tahun ini	4	0	0	4
N. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	171	6	0	177
2.	Masuk Tahun ini	2.110	88	0	2.198
3.	Putus	2.147	86	0	2.233
4.	Sisa Tahun ini	134	8	0	142

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING.

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	44	0	0	44
3.	Putus	44	0	0	44
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0



B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	14	0	0	14
3.	Putus	14	0	0	14
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	2	0	0	2
3.	Putus	2	0	0	2
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	9	0	0	9
3.	Putus	9	0	0	9
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	5	0	0	5
3.	Putus	5	0	0	5
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
F. PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	2	0	0	2
3.	Putus	2	0	0	2
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
G. PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0



H. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	4	0	0	4
3.	Putus	4	0	0	4
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
I. PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
J. PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
K. PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	3	0	0	3
3.	Putus	3	0	0	3
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
L. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
M. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0



N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
O. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	3	0	0	3
3.	Putus	3	0	0	3
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.

Tabel 2.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	2	0	0	2
2.	Masuk Tahun ini	9	0	0	9
3.	Putus	4	0	0	4
4.	Sisa Tahun ini	7	0	0	7
C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	1	0	0	1
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0



D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	1	0	0	1
2.	Masuk Tahun ini	3	0	0	3
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	4	0	0	4
E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
F. PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
G. PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
H. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	2	0	0	2
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	2	0	0	2
I. PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0



J. PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
K. PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
L. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
M. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
O. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0



4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Tabel 2.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	1	0	0	1
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	1	0	0	1
E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0

F.	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
G.	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
H.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
I.	PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
J.	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
K.	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I				
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0



L. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
M. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0
O. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I					
1.	Sisa Tahun Lalu	0	0	0	0
2.	Masuk Tahun ini	0	0	0	0
3.	Putus	0	0	0	0
4.	Sisa Tahun ini	0	0	0	0

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di Provinsi Lampung dalam menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2019 telah melaksanakan mekanisme penerimaan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.



Dalam penerimaan perkara banding Tahun 2019 tersebut baik Pembanding maupun Terbanding ada yang menerapkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1947, dimana Pembanding dapat mengajukan Memori Banding dan Terbanding juga mengajukan kontra memori bandingnya. Pada Tahun 2019 ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berhasil menyelesaikan seluruh perkara yang diterima sebanyak 44 perkara banding dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Cerai Talak | = 11 perkara |
| 2. Cerai Gugat | = 25 perkara |
| 3. Harta Bersama | = 3 perkara |
| 4. Hibah | = 2 perkara |
| 5. Wasiat | = 1 perkara |
| 6. <u>Kewarisan</u> | <u>= 2 perkara</u> |
| Jumlah | = 44 perkara |

Dari 44 perkara tersebut keseluruhannya telah diputus pada tahun ini, sehingga tidak ada sisa perkara. Berdasarkan pendaftaran perkara banding, maka pengadilan agama yang mengajukan perkara banding sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang sebanyak 14 (empat belas) perkara banding yang meliputi :
 - a. cerai talak 4 (empat) perkara
 - b. cerai gugat 7 (tujuh) perkara
 - c. harta bersama 3 (tiga) perkara,
2. Pengadilan Agama Metro sebanyak 2 (dua) perkara yang meliputi:
 - a. cerai gugat 2 (dua) perkara
3. Pengadilan Agama Kalianda sebanyak 5 (dua) perkara, yakni cerai gugat;
 - a. cerai talak 1 (satu) perkara
 - b. cerai gugat 4 (empat) perkara
4. Pengadilan Agama Tanggamus sebanyak 2 (dua) perkara yakni kewarisan;
 - a. cerai gugat 1 (satu) perkara
 - b. kewarisan 1 (satu) perkara
5. Pengadilan Agama Gunung Sugih sebanyak 9 (sembilan) perkara yakni :
 - a. Cerai gugat 5 (lima) perkara;
 - b. Cerai talak 2 (dua) perkara

- c. Wasiat 1 (satu) perkara;
- d. Hibah 1 (satu) perkara
- 6. Pengadilan Agama Tulang Bawang 4 (empat) perkara yakni :
 - a. Cerai gugat 3 (tiga) perkara; dan
 - b. Hibah 1 (satu) perkara
- 7. Pengadilan Agama Krui 1 (satu) perkara yakni :
 - a. Cerai gugat 1 (satu) perkara; dan
- 8. Pengadilan Agama Gedong Tataan 3 (tiga) perkara yakni :
 - a. Cerai gugat 2 (dua) perkara; dan
 - b. Cerai Talak 1 (satu) perkara
- 9. Pengadilan Agama Pringsewu 1 (satu) perkara yakni :
 - a. Waris 1 (satu) perkara;
- 10. Pengadilan Agama Sukadana 3 (tiga) perkara yakni :
 - a. Cerai gugat 1 (satu) perkara; dan
 - b. Cerai Talak 2 (dua) perkara

Sedangkan untuk Pengadilan Agama Kota Bumi, Blambangan Umpu, Mesuji dan Tulang Bawang Tengah pada tahun 2019 ini tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Agamanya.

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Tabel 2.5. Sisa Perkara yang Diputus pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung

NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH PERKARA			TOTAL
		GUGATAN	PERMOHONAN	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG					
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	0	0	0	0
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	0	0	0	0
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0



B.	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	201	6	2	207
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	201	6	0	207
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
C.	PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	101	6	0	107
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	101	6	0	107
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
D.	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	122	2	0	124
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	122	2	0	124
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
E.	PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	150	1	0	151
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	150	1	0	151
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0

F.	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	127	2	0	129
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	127	2	0	129
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
G.	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	118	6	0	124
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	118	6	0	124
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
H.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	46	3	-	49
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	46	3	-	49
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	-	0
I.	PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	61	11	0	72
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	61	11	0	72
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0



J.	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS I I				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	29	3	0	32
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	29	3	0	32
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
K.	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS I I				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	24	0	0	24
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	24	0	0	24
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
L.	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS I I				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	99	2	0	101
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	99	2	0	101
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
M.	PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS I I				
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	7	0	0	7
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	7	0	0	7
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0

N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS I I					
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	38	0	0	38
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	38	0	0	38
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0
O. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS I I					
1.	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	171	6	0	177
2.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus Tahun 2019	171	6	0	177
3.	Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diputus Tahun 2019	0	0	0	0

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada (empat) Lingkungan Peradilan Tanggal 13 Maret 2014, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melakukan monitoring terhadap perkara yang berjalan agar dapat diputus tepat waktu sebagai mana yang telah ditetapkan tersebut. Berikut adalah data perkara yang diputus berdasarkan waktu penyelesaian perkara :

**Tabel 2.6. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada
PTA Bandar Lampung & PA dalam Wilayah Hukum PTA Bandar Lampung**

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2019			
		Putus s.d. 3 bulan	Diputus 3-5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Keterangan
1		3	4	5	6
1.	PTA BANDAR LAMPUNG	44	0	0	
2.	PA TANJUNG KARANG	1.615	321	70	-
3.	PA METRO	579	129	38	-
4.	PA GUNUNG SUGIH	1.598	390	25	-
5.	PA KALIANDA	1.515	263	34	-
6.	PA TANGGAMUS	1.076	141	22	-
7.	PA KOTABUMI	1.172	180	17	-
8.	PA TULANG BAWANG	604	46	2	-
9.	PA KRUI	859	104	9	-
10.	PA BLAMBANGAN UMPU	565	62	6	-
11.	PA GEDONG TATAAN	495	103	8	-
12.	PA PRINGSEWU	465	56	8	-
13.	PA MESUJI	400	16	2	-
14.	PA TULANG BAWANG TENGAH	403	58	6	-
15.	PA SUKADANA	1.782	264	8	-

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK.

Tabel 2.7. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

NO	SATKER	PUTUS	JUMLAH PERKARA		
			TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
			BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI
1		2	3	4	5
1.	PTA BANDAR LAMPUNG	44		0	0
2.	PA TANJUNG KARANG	2.006	1.989	1.997	2.006
3.	PA METRO	742	739	741	742
4.	PA GUNUNG SUGIH	2.403	2.393	2.400	2.402
5.	PA KALIANDA	1.836	1.831	1.835	1.836
6.	PA TANGGAMUS	1.269	1.266	1.268	1.269
7.	PA KOTABUMI	1.385	1.385	1.385	1.385
8.	PA TULANG BAWANG	651	647	649	651
9.	PA KRUI	975	973	975	975
10.	PA BLAMBANGAN UMPU	634	634	634	634
11.	PA GEDONG TATAAN	607	604	607	607
12.	PA PRINGSEWU	1.074	1.072	1.074	1.074
13.	PA MESUJI	427	426	427	427
14.	PA TULANG BAWANG TENGAH	522	522	522	522
15.	PA SUKADANA	2.234	2.230	2.234	2.234

4. JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL MEDIASI.

Tabel 2.8.Jumlah Perkara yang Berhasil Mediasi.

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA			
		YANG DIMEDIASI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	GAGAL
1		2		3	4
1.	PA TANJUNG KARANG	329	12	326	0
2.	PA METRO	57	2	55	0
3.	PA GUNUNG SUGIH	162	2	160	0
4.	PA KALIANDA	109	3	106	0
5.	PA TANGGAMUS	77	1	76	0
6.	PA KOTABUMI	125	11	89	0
7.	PA TULANG BAWANG	44	1	33	6
8.	PA KRUI	53	2	22	7
9.	PA BLAMBANGAN UMPU	85	82	0	0
10.	PA GEDONG TATAAN	54	26	15	18
11.	PA PRINGSEWU	209	73	3	6
12.	PA MESUJI	20	10	0	0
13.	PA TULANG BAWANG TENGAH	35	31	5	2
14.	PA SUKADANA	96	56	2	23

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, **pengertian diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sehingga perkara anak melalui diversi bukan kewenangan Pengadilan Agama.

C. AKREDITASI / PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. POSBAKUM

Pada tahun 2019 sebanyak sembilan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mendapatkan alokasi dana Posbakum. DIPA 04-Badilag yang dialokasikan untuk Posbakum di Pengadilan Agama tersebut telah terserap sebesar 99,28% yakni dari Total Pagu Rp. 195.357.000,-, telah terealisasi sebesar Rp. 193.947.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9. Realisasi Anggaran DIPA-04 Alokasi Posbakum

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
I	Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A	
1	Besaran Pagu	Rp. 30.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 30.000.000,-
3	Jumlah Jam Layanan	300 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	809 Layanan
II	Pengadilan Agama Metro Kelas I A	
1	Besaran Pagu	Rp. 30.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 29.000.000,-
3	Jumlah Jam Layanan	300 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	683 Orang
III	Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B	
1	Besaran Pagu	Rp 25.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp 25.000.000,-
3	Jumlah Jam Layanan	250 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	747 Orang
IV	Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B	
1	Besaran Pagu	Rp 24.457.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp 24.457.000
3	Jumlah Jam Layanan	289 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	1600 Orang

V	Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B	
1	Besaran Pagu	Rp. 25.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 24.600.000,-
3	Jumlah Jam Layanan	250Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	1.098 Orang
VI	Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 25.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 24.990.000,-
3	Jumlah Jam Layanan	250 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	717 Orang
VII	Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 12.700.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 12.700.000,-
3	Jumlah Jam Layanan	97 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	289 perkara
VIII	Pengadilan Agama Krui Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 11.600.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 11.600.000,-
3	Jumlah Jam Layanan	116 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	116 Orang
IX	Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 11.600.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 11.600.000
3	Jumlah Jam Layanan	232 Jam Layanan
4	Jumlah Layanan (orang)	152 (Orang)

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU.

Salah satu peningkatan pelayanan publik yang telah terealisasi oleh seluruh Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung adalah Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu. Di tahun 2019 terdapat 2914 perkara yang disidangkan di luar gedung Pengadilan yakni meliputi 27 lokasi. Berikut adalah pelaksanaan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu di Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung :

Tabel 2.10. Realisasi Anggaran DIPA-04 Alokasi Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
I	Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	-
2	Besaran Pagu	-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	-
4	Jumlah Perkara	-
II	Pengadilan Agama Metro Kelas I A	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	1 lokasi
2	Besaran Pagu	Rp. 30.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 30.000.000,-
4	Jumlah Perkara	107 perkara
III	Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	2 lokasi
2	Besaran Pagu	Rp. 65.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 65.000.000,-
4	Jumlah Perkara	284 perkara
IV	Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	2 lokasi
2	Besaran Pagu	Rp. 85.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 85.000.000,-
4	Jumlah Perkara	612Perkara
V	Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	2 lokasi
2	Besaran Pagu	Rp. 60.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 60.000.000,-
4	Jumlah Perkara	180 Perkara

VI	Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	4 lokasi
2	Besaran Pagu	Rp. 115.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 115.000.000,-
4	Jumlah Perkara	195 perkara
VII	Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	2 lokasi
2	Besaran Pagu	Rp. 75.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 75.000.000,-
4	Jumlah Perkara	410 perkara
VIII	Pengadilan Agama Krui Kelas II	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	2 Lokasi
2	Besaran Pagu	Rp. 85.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 85.000.000,-
4	Jumlah Perkara	204 Perkara
IX	Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II	
1	Jumlah lokasi pelaksanaan sidang di luar Gedung	2 Tempat
2	Besaran Pagu	Rp. 85.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 85.000.000
4	Jumlah Perkara	310 Perkara

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Dalam mewujudkan “*Justice for All*” dengan sasaran masyarakat yang kurang mampu tetap dapat merasakan pelayanan hukum di Pengadilan secara cuma-cuma, Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah merealisasikan anggaran DIPA 04-Badilag untuk Alokasi Perkara Prodeo sebesar 99,35% dari total pagu Rp. 70.000.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran DIPA 04-Badilag alokasi untuk Perkara Prodeo.

Tabel 2.11. Realisasi Anggaran DIPA-04 Alokasi Perkara Prodeo

NO	LAPORAN	TOTAL
1	2	3
I	Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A	
1	Besaran Pagu	Rp. 10.500.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 10.500.000,-
3	Jumlah Perkara	30 perkara
II	Pengadilan Agama Metro Kelas I A	
1	Besaran Pagu	Rp. 7.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 7.000.000,-
3	Jumlah Perkara	20 perkara
III	Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B	
1	Besaran Pagu	Rp. 3.500.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 3.500.000
3	Jumlah Perkara	10 perkara
IV	Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B	
1	Besaran Pagu	Rp. 10.500.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 10.500.000,-
3	Jumlah Perkara	30 perkara
V	Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I B	
1	Besaran Pagu	Rp. 3.500.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 3.500.000,-
3	Jumlah Perkara	10 perkara
VI	Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 7.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 6.899.000,-
3	Jumlah Perkara	19 perkara
VII	Pengadilan Agama Tulang Bawang Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 10.500.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 10.150.000,-
3	Jumlah Perkara	30 perkara

VIII	Pengadilan Agama Krui Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 3.500.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 3.143.000,-
3	Jumlah Perkara	9 perkara
IX	Pengadilan Agama Blambangan Umpu Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 5.250.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 5.250.000,-
3	Jumlah Perkara	15 Perkara
X	Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 1.750.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 1.750.000,-
3	Jumlah Perkara	5 perkara
XI	Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 1.750.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 1.750.000,-
3	Jumlah Perkara	5 perkara
XII	Pengadilan Agama Mesuji Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 1.750.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 1.750.000,-
3	Jumlah Perkara	5 perkara
XIII	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 1.750.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 1.750.000,-
3	Jumlah Perkara	5 perkara
XIV	Pengadilan Agama Sukadana Kelas II	
1	Besaran Pagu	Rp. 1.750.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 1.750.000,-
3	Jumlah Perkara	5 perkara

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berjumlah 386 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sumber Daya Manusia di PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum PTA Bandar Lampung

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG			
1.	Dr. H. NURDIN JUDDAH, S.H., M.H.	Ketua	
2.	Dr. Hj. ROKHANAH, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Dra. HJ. AMINAH AKIL, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
4.	Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H.	Hakim Tinggi	
5.	Drs. H. IMAMUDDIN, S.H.	Hakim Tinggi	
6.	Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H.	Hakim Tinggi	
7.	Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	
8.	Hj. ZAINA YUSUF, S.H., S.Ag.	Hakim Tinggi	Pensiun per tanggal 1 Februari 2020
9.	Drs. H. MOHD. SENIL JAHIDAN, S.H.	Hakim Tinggi	
10.	Drs. DADANG SYARIF, S.H.	Hakim Tinggi	
11.	Drs. H. NASIHIN MUGHNI, M.H.	Hakim Tinggi	
12.	Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H.	Hakim Tinggi	
13.	Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pensiun per tanggal 1 Januari 2020



14.	Drs. ENAS NASAI, S.H.	Hakim Tinggi	
15.	Drs. H. DAMSYI, M.H.	Hakim Tinggi	
16.	Dr. HJ.A.MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.	Hakim Tinggi	
17.	Dr. Drs. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.	Hakim Tinggi	
18.	Drs. DARMADI	Panitera	
19.	Drs. YUSRIZAL, M.H.	Sekretaris	
20.	UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.	Kabag Umum & Keuangan	
21.	YOSRINALDO SYARIEF, S.H., M.H.	Kabag Perencanaan & Kepegawaian	
22.	Drs. ERWIN ROMEL, M.H.	Panitera Muda Banding	
23.	H. AHMAD SYAHAB, S.H. M.H.	Panitera Muda Hukum	
24.	SUDIMAN, S.H.	Kasubbag Renprog& Anggaran	
25.	MUHAMMAD AGUS WIBOWO, S.H., M.H.	Kasubbag TU& Rumah Tangga	
26.	HARDINI TAWANGSARI, S.Si., M.H.	Kasubbag Kepegawaian & TI	
27.	MEDI EFENDI, S.Pd., M.H.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	
28.	Dra. Hj. ISMIWATI, M.H.	Panitera Pengganti	
29.	Drs. ABDUL RIFA'I, M.H.	Panitera Pengganti	
30.	ULIANA MA'MUR , S.Ag.	Panitera Pengganti	



31.	H. NASRON HUSEIN, S.H.	Panitera Pengganti	
32.	Dra. Hj. ZURAIDA, M.H.	Panitera Pengganti	
33.	HASBI HAMZAH, S.H.	Panitera Pengganti	
34.	H. MAHDI, S.Ag.	Panitera Pengganti	
35.	Drs. RIDUANSYAH	Panitera Pengganti	
36.	ELLINA AR, S.H.	Panitera Pengganti	
37.	DESTIA FAUZI SODRI, S.E., M.M.	Analisis Kepegawaian	
38.	MARIA NAVRATILOVA, S.E., M.H.	Analisis Kepegawaian	
39.	RESTU YUNIARTI, S.Kom., S.H., M.M.	Pranata Komputer	
40.	RIFKA APRILIA, S.E., M.M.	Pelaksana Penyusun Rencana Promosi	
41.	WINDA DWI ASTARI, S.E.	Pengelola Kepegawaian	Cuti diluar tanggungan Negara
42.	MARTINI, S.H.	Pelaksana Analisis Rencana Program dan Anggaran	
43.	BERNIATI, S.E., M.H.	Pembuat Daftar Gaji	
44.	SRI AGUSTININGSIH, S.Si., M.M.	Pelaksana Pengadministrasi Umum	
45.	ANDI APRIYANTO, S.H.	Pelaksana Pengadministrasi Hukum	
46.	ZAKIYAH, S.Kom.	Bendahara	



47.	AHMAD ANWAR, S.T.	Pengelola Kepegawaian	
48.	MUHAMMAD ARIF AMRULLAH, S.Kom.	Adm Panmud Banding	
49.	EFRI INDRAWAN, A.Md.	Pelaksana Pengadministrasi Umum	
50.	YUNITA INDERA FITRI ARI, S.H.	Pelaksana Pengadministrasi Persuratan	
51.	RIZA HABIBI CETA PUSAKA	Analisa Perencana, Evaluasi, dan Pelaporan	Proses Pemberhentian
52.	JATRA ARYA PERDHANA	Analisa Renstra, Program, dan Kegiatan	
53.	BUDIYANTO	Penyusun Laporan Keuangan	
54.	ZEN HUSNI	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Pelaporan	
55.	KIKI IRWANSYAH	Pengelola Perkara	
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A			
1.	Drs. H. Ediwarman, S.H., M.H.	Ketua	
2.	-	Wakil Ketua	Kosong
3.	Drs. H. Sanusi, M.Sy.	Hakim	
4.	Dra.H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.	Hakim	
5.	Drs. H. Nurkholish, M.H.	Hakim	
6.	Dra.Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.	Hakim	



7.	Drs. H. Shalahuddin Haji Abbas, MH.	Hakim	
8.	Dra. Hj. Nadimah	Hakim	
9.	Drs. A. Nasrul Md.	Hakim	
10.	Drs. Joni Jidan	Hakim	
11.	Dra. Hj. Faridah, M.H.	Hakim	
12.	Drs. Wasyhudi, M.Hum.	Hakim	
13.	Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.	Hakim	
14.	Drs. Sunariya	Panitera	
15.	M. Zachrizal Anwar, S.H.	Sekretaris	
16.	Deska Pitrah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	
17.	Hj. Zulhaida, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	
18.	Dra. Husnidar	Panitera Muda Permohonan	
19.	-	Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Kosong/Mutasi Kasubag. Umum dan Keuangan PA Tanjungkarang
20.	Erlin Faulina, S.T.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
21.	A. Fathurrohman, S.H., M.H.	Kasubbag. Kepengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	
22.	Mahmilawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
23.	Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
24.	Astri Kurniawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	



25.	Anika Rahmah, S.Ag.	Panitera Pengganti	
26.	Nursiah, S.H.I	Panitera Pengganti	
27.	Vivi Wanty, S.H.	Panitera Pengganti	
28.	Rahmatiah Oktafiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
29.	Senioreta Mauliasari, S.H.	Panitera Pengganti	
30.	Dra. Nelfirdos, M.H.	Panitera Pengganti	
31.	Kiptiyah, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
32.	Haryati, S.H.	Panitera Pengganti	
33.	Himbauan, S.H., M.M.	Panitera Pengganti	
34.	Ahmad Subroto, S.E., M.H.	Jurusita	
35.	Ari Eka Putra, S.H.	Jurusita	
36.	Mulyati, S.H.	Jurusita	
37.	Dwi Astuti	Jurusita Pengganti	
38.	Dra. Masturah	Jurusita Pengganti	
39.	Nurhayati, S.H.I	Jurusita Pengganti	
40.	Yasir, S.H.	Jurusita Pengganti	
41.	Mastuhi, S.Ag., M.H.	Jurusita Pengganti	
42.	M. Ali	Staf Panmud Permohonan	
43.	Idrus, S.H.	Staf	
44.	Suci Rahayu Ningsih, S.Sos.	CPNS	

C.	PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A		
1.	Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I.	Ketua	
2.	Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H.	Hakim	
3.	Drs. H. Musthofa Amin	Hakim	
4.	Dra. Alia Al Hasna, M.H.	Hakim	
5.	Drs. Machfudl S	Hakim	
6.	Drs. Aminuddin	Hakim	
7.	H. Edy Kisay, S.H., M.H.	Panitera	
8.	H. Bunyamin, S.Ag.	Sekretaris	
9.	Syukur, S.Ag., M.H.	Panmud Hukum	
10.	Hj. Fauziah, S.HI.	Panmud Gugatan	
11.	Ros Amanah, S. Ag.,M.H.	Panmud Permohonan	
12.	H. Rusbani, S.H.	Kasubbag Kpegawaian dan Ortala	
13.	Yoshi Aria, S.T.	Kasubbag Perencanaan,TI dan Pelaporan	
14.	Fadli Akuntanto, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
15.	Hj. Rosda, S. HI.	Panitera Pengganti	
16.	Trisno Hari Santoso	Panitera Pengganti	
17.	Sya'yansyah, S. Ag.	Panitera Pengganti	
18.	Erna Yuli Susanti, S.HI.	Panitera Pengganti	
19.	Rizky Amalia, SH., M.H.	Panitera Pengganti	



20.	Fitri Chindithia S, S.HI., M.H.	Panitera Pengganti	
21.	Wawan Kurniawan, S.Sy.	Panitera Pengganti	
22.	Yudi Afrizal, S.Sos.	Jurusita	
23.	Mega Octaria S., S.H.	Jurusita	
24.	Aliefia Qurrotu Ainin, S. EI.	Jurusita Pengganti	
25.	Siti Lestari	Jurusita Pengganti	
26.	Eka Resetia Jayanti, S.H.	Staf Umum dan Keuangan	
27.	Desy Melinting, A. Md.	Staf Kepegawaian dan Ortala	
28.	Dayatri Malinting, S.H., M.H.	Staf Umum dan Keuangan	
29.	Rezkiani Davinza Wulandari, S.E.	CPNS	
30.	Meyrista Bella Putri, S.H.	CPNS	
D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B			
1.	Drs. H. Faiq, M.H.	Ketua	
2.	Alwin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.	Hakim	
4.	Sobari, SHI.	Hakim	
5.	Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.	Hakim	
6.	Uswatun Hasanah, SHI., MH.	Hakim	
7.	H. Sarman, S.H.	Panitera	
8.	Gunawan, S.H.I.	Sekretaris	
9.	Dra. Humaidah	Panmud Permohonan	
10.	Usman A. S.Ag., M.H.	Panmud Gugatan	

11.	Khairul Hadi, SH.	Panmud Hukum	
12.	Osi Yunastari Z, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
13.	Nofri Hidayat, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
14.	Zahra Fatimah Mu'min, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	
15.	Novendaria Rosa Anita,SH.,MH	Panitera Pengganti	
16.	Fatma, S.H.	Panitera Pengganti	
17.	Ety Hasniyati, S.HI	Panitera Pengganti	
18.	M. Nur Ardian, S.H.	Jurusita	
19.	Aswan Radesa Putra	Jurusita	
20.	Suherman	Jurusita Pengganti	
21.	Marhayah	Administrasi Umum	
22.	Nurhasanah, SH.	Administrasi Umum	
23.	Eliyani	Administrasi Umum	
24.	Finnur	Administrasi Umum	
E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B			
1.	Dra.Hj.Sartini, S.H., M.H.	Ketua	
2.	Drs.H.Mahyuda,MA	Wakil Ketua	
3.	Hj.Khairunnisa, S.H.I.MA	Hakim	
4.	Ahmad Hidayat, S.H.I.MA	Hakim	



5.	Nur Hidayat,S.Ag,MA	Hakim	
6.	M.Iqbal,S.Ag,S.H.	Panitera	
7.	Siti Aminah,S.Fil,I,M.H.	Sekretaris	
8.	Denny Efrian,S.H,M.H.	Panmud. Gugatan	
9.	Aldan,S.H.	Panmud Permohonan	
10.	Husniatun Aini,S.H.	Panmud Hukum	
11.	Herman,S,S.Kom,M.M	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
12.	Purwadi	Kasubag Keuangan dan Umum	
13.	Ikhwan Ihsan.AY,S.E,S.H.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	
14.	Nurlaila,S.HI	Panitera Pengganti	
15.	Suhendi,S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Masroah,S.HI	Panitera Pengganti	
17.	Silvy Sagita,S.H	Panitera Pengganti	
18.	Athya Kirana,S.HI	Panitera Pengganti	
19.	Najahaitami,S.HI	Juru Sita	
20.	Febria Dewita,S.Kom	Juru Sita	
21.	Hadani Robbi	Juru Sita Pengganti	
22.	Marmiatun,S.Ag	Staf	



23.	Trimas Ayu Lestari,S.Ap	CPNS	
F.	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B		
1.	Drs. H. Asrori, S.H., M.H.	Ketua	
2.	Drs. M. Ihsan, M.H.	Wakil Ketua	
3.	Aziz Mahmud Idris, S.H.I.	Hakim	
4.	Ade Ahmad Hanif, S.H.I.	Hakim	
5.	Maswari, S.H.I., M.H.I.	Hakim	
6.	Achmad Iftauddin, S.Ag.	Hakim	
7.	Zuhri, S.H.	Panitera	
8.	Anis Khoirunnisa, S.Ag.,M.H.	Sekretaris	
9.	Asmarikad, S.H., M.H.	Panmud Gugatan	
10.	Elpina, S.Ag	Panmud Permohonan	
11.	Herfi Meilina, S.H.	Panmud Hukum	
12.	Masnona, S.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
13.	Rina Malasari, S.Kom	Kasubag Keuangan dan Umum	
14.	Edhi Hartoyo, S.Pd., S.H.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	
15.	Drs. Yulianto .Z	Panitera Pengganti	
16.	Rodiyati, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	
17.	Kurnia Gustiati, S.H., M.H.	Panitera	



		Pengganti	
18.	Siyanto, S.H.	Panitera Pengganti	
19.	Yudi Susanto, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	Fajri Nur, S.H.	Panitera Pengganti	
21.	Sudiyana, S.H.	Panitera Pengganti	
22.	Hermes, S.Ag.	Juru Sita	
23.	Agus Sungkowo	Juru Sita	
24.	Andri Nazar Pratama, S.H.	Juru Sita Pengganti	
25.	Gilang Evarini Sukmawati, A.Md	Juru Sita Pengganti	
26.	Usman	Pelaksana	
G PA KOTABUMI			
1.	H. Zumrowi, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	H. Rodiyah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Muhammad RaIS, S.Ag., M.Si.	Hakim	
4.	Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.	Hakim	
5.	Junaedi, S.H.I.	Hakim	
6.	Hj. Soleha, S.Ag., M.H.	Panitera	
7.	Siti Maria, S.H., M.E.Sy.	Panitera Muda Hukum	
8.	Agus Dianningsih, S.H.	Panitera Muda Gugatan	
9.	M. Djulizar, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	

10.	Teti Pitriani, S.HI	Panitera Pengganti	
11.	Yuli Anita, SH	Panitera Pengganti	
12.	Fakta Saimigo, S.H.	Panitera Pengganti	
13.	Rusli Burhan, S.H.	Jurusita	
14.	Yenni Mayasari, S.H.	Jurusita Pengganti	
15.	Agus Lukmanul Hakim, A.Md.	Jurusita Pengganti	
16.	Asrah, S.H.	Jurusita Pengganti	
17.	Endang Sugiarti, S.H.	Jurusita Pengganti	
18.	Ridwan Saidi	Jurusita Pengganti	
19.	Aziz Iskandar, S.E.	Sekretaris	
20.	Hasnar, B.A.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
21.	Kurniawan Putrakusuma, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
22.	Bushido Mirza, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	
23.	David Hasan	Staf Bagian Umum dan Keuangan	
24.	Muhammad Ridho, S.Sy.	Cakim	
25.	Abdul Azis, S.Sy.	Cakim	
H.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II		
1.	H. Soleh, Lc., M.A.	Ketua	

2.	Nur Said, S.H.I., M.Ag	Wakil Ketua	
3.	Yunanto, S.H.I., M.H.	Hakim	
4.	Fitri, S.H.I., M.H.	Hakim	
5.	Sunlina Baiti, S.H.	Panitera	
6.	Aswari Humpara, S.H.	Sekretaris	
7.	Agustina Susilawati, S.Ag	Panmud Hukum	
8.	Evi Andriyani, S.Ag.	Panmud Permohonan	
9.	Hj. Rahmiyati, S.Ag.	Panmud Gugatan	
10.	Sri Widaryani, S.E., M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
11.	Ravika, S.H.	Kasubbag KP dan Ortala	
12.	Irwan Hidayat, S.H.I.	Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	
13.	Mukhlis, S.H.I.	Panitera Pengganti	
14.	Reza Reski Arisandi, S.H.I.	Panitera Pengganti	
15.	Suhartini, S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Zubaidi	Panitera Pengganti	
17.	Andi Gustiawan, A.Md	Jurusita	
18.	Masdi	Jurusita Pengganti	
19.	Maulina Nuril Izzati, S.Sy	Cakim	
20.	Nur Halimah, S.H.I.	Cakim	

I. PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II			
1.	Nurbaeti, S.Ag, MH	Ketua	
2.	Asep Irpan Helmi, SH., MH	Wakil Ketua	
3.	Ali Muhtarom, SHI., MHI	Hakim	
4.	Romi Maulana, SHI	Cakim	
5.	A. Rajman, SH	Panitera	
6.	Dra. Arwani	Panitera Muda Hukum	
7.	H. Sumarjo	Panitera Muda Gugatan	
8.	Rahmawati, SH, MHI	Panitera Muda Permohonan	
9.	Defi Tri Andari, SH	Panitera Pengganti	
10.	Samharudin	Jurusita	
11.	Fitri Nurhayati	Jurusita Pengganti	
12.	Hazri, S.Ag	Staf Panitera MudaHukum	
13.	Bayu Baskoro, S.Sy	Staf Panitera Muda Gugatan	
14.	Agustiansyah Salim, SH	Sekretaris	
15.	Andi Mulyadinata, SE., MM	Kepala Sub BagianUmum dan Keuangan	
16.	Adyansyah, SH	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana	

17.	Meilina Yulien, S.Kom, S.Sy	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
18.	Yusri Amien, S.Kom, MH	Staf Bagian Umum dan Keuangan	
J. PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II			
1.	Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	Ahmad Kholil, R, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.	Hakim	
4.	Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.	Panitera	
5.	M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	
6.	Rosita, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan	
7.	Edy Riadi, S.Sos., S.H.	Panitera Muda Permohonan	
8.	Udin S, S.H.	Panitera Pengganti	
9.	Miswanto	Jurusita	
10.	Misini, S.H.	Jurusita Pengganti	
11.	Mukhlis Haryanto, S.H.	Jurusita Pengganti	
12.	Hastuti Yeni HS, S.H.	Jurusita Pengganti	
13.	Gading Wardian, S.H.	Jurusita Pengganti	
11.	Hamsiri, S.Pd., S.H.I.	Sekretaris	
12.	Aris Margono, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
13.	Harmonis, S.Pd.I.	Kepala Sub Bagian	



		Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana	
14.	Irfan Junial, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
15.	Evi Novriah, S.E.	Staf Bagian Umum dan Keuangan	
16.	Yoga Maolana Wiharja, Lc.	Cakim	
17.	Muhamad Ainun Najib, S.H.I.	Cakim	
K. PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II			
1.	Elis Marliani, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	Dadi Aryandi, S.Ag.	Wakil Ketua	
3.	M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.	Hakim	
4.	Hj. Masriah Hi. Salasah, S.H.I.	Hakim	
5.	Redoyati, S.H., M.H.	Panitera	
6.	Indria Yulisa, S.E.	Sekretaris	
7.	Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.	Panmud Permohonan	
8.	Eliyati Sury, S.Ag., M.H.	Panmud Hukum	
9.	Rosmiati, S.H., M.H.	Panmud Gugatan	
10.	Melza Diana, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
11.	Edwan Saputra, S.H., M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan	
12.	Nurul Hidayah, S.E.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana	



13.	Dewi Oktavia, S.H.	Panitera Pengganti	
14.	Nurul Huda, S.H.I.	Panitera Pengganti	
15.	Apriyanto Endar Setiyawan, S.H.	Jurusita	
16.	Kristina Mellyza, S.A..N., M.M.	Staf/Pelaksana	
17.	Gojali, S.H.	Staf/Pelaksana	
18.	M. Beni Kurniawan, S.Sy.	CPNS/Cakim	
19.	Nursa Dwi Purnama, S.H.I.	CPNS/Cakim	
20.	Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.	CPNS/Cakim	
21.	Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.	CPNS/Cakim	
22.	Jusran Ipandi, S.H.I.	CPNS/Cakim	
23.	Danisa Inna Putrisia, S.A.N.	CPNS	
24.	Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.	CPNS	
25.	Yeyen Novitasari, A.Md.	CPNS	

L. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II

1.	Ridwan Harahap, S.H., M.H.	Ketua	
2.	Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.	Hakim	
4.	Faisal Amri, S.H.I., M.H.	Hakim	
5.	Edi Laili, Sh., M.H.	Panitera	
6.	Tri Joko Sulistomo, S.H.	Sekretaris	
7.	Linda Hastuti, S.H., M.H.	Panitera MudaGugatan	
8.	Amnia Burmella, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	
9.	Taufik Hidayah, S.H.I.,S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	



10.	Munawaroh, S.H.I.	Kasubbag umum dan Keuangan	
11.	Indah Wahyuningsih, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
12.	Septina, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
13.	Jumirawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
14.	Tugi Suswanti, S.H.	Panitera Pengganti	
15.	Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Rio Aditya Nugraha, S.I.Kom.	Juru Sita	
17.	Nurman Ferdiana, S.H.	PNS/Cakim	
18.	Muhammad Iksan Purnomo, Lc.	PNS/Cakim	
19.	Muhajir Anshori, S.H.I.	PNS/Cakim	
20.	Sahram, S.H.	PNS/Cakim	
21.	Tony Abdul Syukur, S.H.I.	PNS/Cakim	
22.	Sandi Irawan, S.H.	CPNS	
23.	Eka Ramadhani, S.E.	CPNS	
24.	Diani Widyaningrum, A.Md.	CPNS	
M. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II			
1.	H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.	Ketua	
2.	Padmilah, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.	Hakim	
4.	Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.	Hakim	
5.	Sabrimen, S.Ag., M.H.	Panitera	



6.	Muhammad Mudatsir, S.Ag.	Sekretaris	
7.	Malik Yarham Samosir, S.E.I.	Panitera Muda Gugatan	
8.	Bustanul Arifin Sodik, S.H.	Panitera Muda Hukum	
9.	Asep Subhi, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	
10.	Abdul Wahid Aziz, S.Kom.	Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	
11.	Meta Dianto, S.I.P.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
12.	Rifqi Jaipal, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana	
13.	Imanuddin Tenda, S.H.	Panitera Pengganti	
14.	Muhammad Arsad	Jurusita	
15.	Asep Ginanjar Maulana F, S.Sy.	Cakim	
16.	Badri Yunardi, S.Sy.	Cakim	
17.	Rivaldi Fahlepi, S.H.	Cakim	
18.	M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.	CPNS	
19.	Ganis Rengganis, S.Sos	CPNS	
20.	Dwi Setyo Darmawan, A.Md.	CPNS	
N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II			
1.	April Yadi, S.Ag, M.H	Ketua	
2.	Al Fitri S.Ag., S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	
3.	Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I	Hakim	
4.	Novendri Eka Saputra, S.H.I	Hakim	



5.	Miswardi, S.H	Panitera	
6.	Muhammad Mudatsir, S.Ag	Sekretaris	
7.	Nilawati, S.H	Panitera Muda Gugatan	
8.	Chairun Nafar, S.H	Panitera Muda Permohonan	
9.	M. Agus Muslim, S.H.I	Panitera Muda Hukum	
10.	Rudi Habibi, S.H	Panitera Pengganti	
11.	Mohammad Makmun	Jurusita	
12.	Ahmad Suryadharma, S.S	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
13.	Herny Pratiwi, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
14.	Agustine Pratiwi, S.E	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana	
15.	Venti Ambarwati, S.H.I.	Cakim	
16.	Laili Herawati, S.Sy	Cakim	
17.	A.Syaiful Anam, Lc.	Cakim	
18.	Zahratul Aliyah, S.H.	CPNS	
19.	Chici Afrianita Sinaga, S.I.P.	CPNS	
20.	M. Aznan Jainuri, Amd.	CPNS	
O.	PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II		
1.	Erna Resdya, S.H.I., M.E.	Ketua Pengadilan	
2.	H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua	



		Pengadilan	
3.	Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.	Hakim Tingkat Pertama	
4.	Liza Roihanah, S.H.I., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	
5.	Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.	Hakim Tingkat Pertama	
6.	Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	
7.	Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.	Hakim Tingkat Pertama	
8.	Mohammad Ilhamuna, S.H.I.	Hakim Tingkat Pertama	
9.	Drs Solehani	Panitera	
10.	Muhtaria, S.H.	Sekretaris	
11.	Jhoni Firmansyah, S.H.	Panmud Hukum	
12.	Faizal Habib, S.H.I.	Panmud Gugatan	
13.	Tuti Alawiyah, S.H.I.	Panmud Permohonan	
14.	Fitriani, S.Ag.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
15.	Nurrahmat Syarief, S.E.	Kasubag Umum dan Keuangan	
16.	Mery Candra Giana, S.Ag.	Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan	
17.	Sawaludin Wahid, S.Ag.	Panitera Pengganti	
18.	Mustofa, S.H.I.	Panitera Pengganti	
19.	Ahmad Syuyukhi, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	Syaiful Rohim, S.H.	Panitera Pengganti	



21.	Asep Supriadi, S.H.I.	PaniteraPengganti	
22.	Mashuri, S.H.I.	PaniteraPengganti	
23.	Maryam, S.H.	PaniteraPengganti	
24.	Yudi Waneri, S.H., M.M.	Jurusita	
25.	Andie Farza, S.H.	Jurusita	
26.	Kartono	Jurusita	
27.	Rossi Supriadi, S.H.	Staf	
28.	Ana Latifatuz Zahro, S.H.	Calon Hakim	
29.	Lasifatul Launyah, S.H.	Calon Hakim	
30.	Laeli Fajriyah, S.H.I.	Calon Hakim	
31.	Khatimatus Sa`Adah, S.H.I.	Calon Hakim	
32.	Rartri Nurul Hikman, S.Sy.	Calon Hakim	
33.	Ida Yunidar, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
34.	Clara Yolanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
35.	Pebrian Eko Saputra, A.Md.	Pengelola Dan Pemelihara IT	

1. MUTASI

Mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terdiri dari mutasi yang merupakan perpindahan pegawai antar satuan kerja sewilayah Indonesia maupun sewilayah PTA Bandar Lampung selama tahun 2019 serta mutasi Pangkat selama dua periode pada tahun 2019 dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3.2. Mutasi Hakim dan Pegawai pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung

No	MUTASI	JUMLAH
1	2	3
1.	Mutasi Keluar	33 orang
2.	Mutasi Kedalam	66 orang
3.	Mutasi Dalam Wilayah PTA Bandar Lampung	95 orang
4.	Mutasi Pangkat (teralisasi)	
	i. Periode April 2019	29 orang
	ii. Periode Oktober 2019	18 orang

2. PROMOSI

Promosi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama tahun 2019 baik dari jabatan teknis yudisial maupun dari jabatan non teknis yudisial berjumlah 110 orang, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3.3. Promosi Hakim dan Pegawai pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung

No	PROMOSI	JUMLAH
1	2	3
1	Promosi Keluar	20 orang
2	Promosi Kedalam	27 orang
3	Promosi Dalam Wilayah PTA Bandar Lampung	63 orang
TOTAL		110 orang

3. PENSIUN

Hakim dan Pegawai yang pensiun pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama tahun 2019 berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pensiun Hakim dan Pegawai pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung

No	Nama/NIP	GOL RUANG	Jabatan/ Satker	TMT/ Alasan Pensiun
1	2	4	5	6
1.	Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, S.H. NIP. 19520706 198203 1 003	IV/e	Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung	Batas Usia Pensiun
2.	Drs. A. MU'THI, M.H. NIP. 19520503 198303 1 003	IV/e	Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung	Batas Usia Pensiun
3.	Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H. NIP. 19521229 198203 1 002	IV/e	Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung	Batas Usia Pensiun
4.	Drs. MASIRAN MALKAN NIP. 195410291979031004	IV/d	Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	Batas Usia Pensiun
5.	H. Damsah, S.H. NIP. 195911241982031003	IV/b	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro	Batas Usia Pensiun

4. DIKLAT

Hakim dan Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Nonteknis pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama tahun 2019 berjumlah 28 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Diklat yang diikuti Hakim dan Pegawai pada PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Bandar Lampung

No	Jenis Diklat	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kelulusan (%)
1	2	4	5	6
1	Diklat Teknis Peradilan	2	17	100%
2	Diklat Manajemen Kepemimpinan	0	0	100%
3	Diklat Lainnya	5	35	100%
TOTAL		7	52	100%

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA,
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Berikut ini adalah rekapitulasi realisasi anggaran belanja teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun anggaran 2019:

Tabel 4.1. Matriks Realisasi Anggaran Belanja Non Teknis DIPA 01- Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2019 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	16.095.185.000	15.968.989.044	99,22	127.841.925	0,79	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	13.960.287.000	12.847.096.592	92,03	2.168.424	0.01	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	1.955.589.000	1.791.954.231	97.08	41.905.239	2.92	
	1066 (051)	Belanja Barang Non Operasional	35.000	0	0	35.000	100	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	556.500.000	556.064.022	99.92	435.978	0.08	
	1071 (951)	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	556.500.000	2.254.747.500	99.92	435.978	0.08	
JUMLAH			16.651.685.000	16.525.053.066	99,24	128.277.903	0.86	
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	8.611.569.000	8.541.788.376	98.92	69.780.624	1.08	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	7.564.269.000	7.499.968.034	99,33	64.300.966	0,67	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	1.045.100.000	1.041.160.342	99,62	3.939.658	0,38	
	1066 (051)	Belanja Barang Non Operasional	2.200.000	660.000	30	1.540.000	70	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	699.359.000	699.359.000	100	0	-	
	1071 (051)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.500.000	63.500.000	100	0	-	



	1071 (052)	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	635.859.000	635.859.000	100	0	-	
JUMLAH			9.310.928.000	9.241.147.376	74	69.780.624	26	
C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.546.550.000	5.483.422.908	98,86	63.1129.971	1,14	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	4.726.624.000	4.719.266.081	99,84	7.360.798	0,16	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	815.126.000	800.668.236	98,23	14.457.764	1,77	
	1066 (007)	Belanja Barang Non Operasional	4.800.000	4.800.000	100	0	-	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	64.000.000	64.000.000	100	0	-	
	053	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	64.000.000	64.000.000	100	0	-	
JUMLAH			5.610.550.000,-	5.588.734.317	99,61	21.818.562	0,39	
D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	4.489.626.000	4.253.747.615	94,75	235.878.385	5,25	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	3.180.215.000	3.158.305.287	99,31	21.909.713	0,69	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	786.539.000	777.642.592	98,87	8.896.408	1,23	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	66.000.000	66.000.000	100	0	0,00	
	1071	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	66.000.000	66.000.000	100	0	0,00	
JUMLAH			4.555.626.000	4.319.747.615	94,88%	235.878.385	5,12	
E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	3.994.550.000	3.941.318.142	98,7	53.231.858	1,3	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	166.000.000	165.507.997	99,7	492.003	0,3	
JUMLAH			4.160.550.000	4.106.826.139	98,7	53.723.861	1,3	
F. PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	4.041.192.000	3.992.693.500	99,98	48.498.500	0,02	

		Belanja Pegawai	3.283.281.000	3.254.848.760	99,13	28.432.240	0,87	
		Belanja Barang	757.911.000	737.844.740	97,61	18.066.260	2,39	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	51.000.000	51.000.000	100	0	0,00	
	1071	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	51.000.000	51.000.000	100	0	0,00	
JUMLAH			4.092.192.000	4.043.693.500	99,98	48.498.500	0,02	
G. PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	3.872.468.000	3.837.719.464	99,99	34.748.536	0,01	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	3.012.092.000	3.005.036.289	98,67	7.055.711	1,65	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	857.076.000	829.383.175	99,96	27.692.825	0,04	
	1066 (011)	Belanja Barang Non Operasional	3.300.000	3.300.000	100,00	0	-	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	38.000.000	38.000.000	99,00	500.000	0,10	
	1071	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	38.000.000	38.000.000	99,00	500.000	0,10	
JUMLAH			3.910.468.000	3.875.291.464	98,32	35.248.536	1,30	
H. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II								
1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	3.038.769.000	3.025.608.248	99,57	13.160.752	0,43	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	2.235.245.000	2.231.545.830	99,89	3.699.170	0,11	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	778.324.000	769.559.217	99,87	8.764.783	0,13	
	1066 (011)	Belanja Barang Non Operasional	25.200.000	25.200.000	100	0	0,00	
2	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	51.000.000	51.000.000	100	-	-	
	1071	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	51.000.000	51.000.000	100	-	-	
JUMLAH			3.089.769.000	3.076.608.248	99,57	13.160.752	0,43	
I. PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	2.783.041.000	2.716.234.357	97,59	66.806.643	2,41	
	1066 (970)	Layanan Dukungan Manajemen	6.300.000	6.300.000	100	0	0	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	2.086.536.000	2.046.864.116	98,14	39.671.884	1,90	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	383.104.000	367.155.618	95,84	15.948.382	4,16	

	1066 (002)	Belanja Barang Non Operasional	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
	1066 (002)	Belanja Barang Persediaan	63.236.000	62.183.332	98,34	1.052.668	1,66	
	1066 (002)	Belanja Jasa	43.640.000	33.519.984	76,81	10.120.016	23,18	
	1066 (002)	Belanja Pemeliharaan	129.225.000	129.211.307	99,99	13.693	0,01	
	1066 (002)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.500.000	67.500.000	100	0	0	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	131.000.000	131.000.000	100	0	0	
	1071 (951)	Layanan Sarana dan Prasarana Dinas Salam Negeri	131.000.000	131.00.000	100	0	0	
JUMLAH			2.914.041.000	2.847.234.357	97,74	66.806.643	2,26	
J. PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	2.925.965.000	2.904.202.379	99	21762621	0,1	
	1066 (001)	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	7.500.000	7.500.000	100	-	-	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	2.215.745.000	2.198.587.150	99,96	17.158.850	0,04	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	702.719.000	698.115.229	99,86	4.603.771	0,14	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	12.500.000	12.500.000	100	0	0	
	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	12.500.000	12.500.000	100	0	0	
JUMLAH			2.938.465.000	2.916.702.379	99,95	21.762.621	0,05	
K. PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	2.394.736.000	2.345.254.581	97,93	49.481.419	2,07	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	1.936.226.000	1.913.441.987	98,82	22.786.044	1,18	
	1066 (002)	Belanja Barang	458.510.000	431.812.594	94,18	26.697.406	5,82	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	423.500.000	422.547.500	99,78	952.500	0,22	
JUMLAH			2.818.236.000	2.767.802.081	98,21	50.433.919	1,79	

L. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	2.211.968.000	2.180.224.035	98,56	31.743.965	1,44	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	1.818.858.000	1.796.254.277	98,75	22.603.723	1,24	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	393.110.000	383.969.758	97,67	9.140.242	2,33	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	423.500.000	422.583.500	99,78	916.500	0,22	
JUMLAH			2.635.468.000	2.602.807.535	98,76	32.660.465	1,23	
M. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis						
	1066 (001)	Belanja Pegawai	1.725.810.000	1.703.908.458	98,73	21.901.542	1,27	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	448.110.000	446.247.271	99,58	1.862.729	0,42	
	1066 (007)	Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-	-	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	423.500.000	418.353.500	98,78	5.050.000	1,22	
JUMLAH			2.597.420.000	2.568.509.229	99,87	28.814.271	1,13	
N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis						
	1066 (001)	Belanja Pegawai	2.499.691.000	2.487.626.637	99,52	12.064.363	0,48	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	468.510.000	432.860.000	92,39	35.650.000	7,61	
	1066 (007)	Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-	-	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	423.500.000	416.310.000	99,30	7.190.000	1,7	
JUMLAH			2.450.822.000	2.416.272.021	98,59	34.549.979	1,41	

N. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis						
	1066 (001)	Belanja Pegawai	2.499.691.000	2.487.626.637	99,52	12.064.363	0,48	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	468.510.000	432.860.000	92,39	35.650.000	7,61	
	1066 (007)	Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-	-	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	
	1066 (051)	Pengadaan Kendaraan Bermotor	300.000.000	298.645.000	99,55	12.064.363	0,48	
	1066 (052)	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	123.500.000	123.400.000	99,91	100.000	0,01	
JUMLAH			2.968.201.000	2.920.486.637	98,39	47.714.363	1,61	

Tabel 4.2. Matriks Realisasi Anggaran Belanja Teknis DIPA 04- Badilag Tahun Anggaran 2019 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KE T
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG								
I	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94.515.000	94.345.400	99,82	169.600	0,18	
	1053.002	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	94.515.000	94.345.400	99,82	169.600	0,18	
JUMLAH			94.515.000	94.345.400	99,82	169.600	0,18	
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A								
I	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	90.100.000	89.450.000	99,28	1.115.000	1,24	
	1053.002	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	0	0	0	0	0,00	

	1053.003	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	10.500.000	10.425.000	100,00	75.000	0,00	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	30.000.000	30.000.000	100,00	0	0,00	
JUMLAH			40.500.000	40.425.000	100,00	75.000	0,00	
C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67.000.000	66.000.000	98,51	1.000.000	1,49	
	1053.003	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	7.000.000	7.000.000	100	0	0	
	1053.004	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang Diluar Gedung/ Sidang Terpadu	30.000.000	30.000.000	100	0	0	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	30.000.000	29.000.000	96,67	1.000.000	3,33	
JUMLAH			67.000.000	66.000.000	98,51	Rp. 1.000.000	1,49	
D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94.400.000	92.957.000	98,47	1.433.000	2,63	
	1053.A	Pembebasan Biaya Perkara	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
	1053.B	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	65.000.000	65.000.000	100	0	0	
	1053.C	Jasa Konsultasn Layanan Bantuan Hukum	25.900.000	24.457.000	94.43	1.433.000	6,67	
JUMLAH			94.400.000	92.957.000	98.47	1.433.000	2.63	
E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	120.500.000	120.500.000	100	0	0	
	1053.001	Pembebasan Biaya Perkara	10.500.000	10.500.000	100.00	0	0.00	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	85.000.000	85.000.000	100.00	0	0.00	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	25.000.000	25.000.000	100.00	0	0.00	
JUMLAH			120.500.000	120.500.000	100	0	0	

F. PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	123.500.000	121.000.000	97,97	0	2,03	
	1053.001	Pembebasan Biaya Perkara	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	60.000.000	60.000.000	100	0	0	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	25.000.000	24.600.000	98,40	400.000	2,60	
JUMLAH			88.500.000	88.100.000	99,54	400.000	0,46	
G. PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	160.000.000	159.907.000	99,93	93.000	0,07	
	1053.001	Pembebasan Biaya Perkara	7.000.000	6.917.000	99,01	83.000	0,09	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	115.000.000	115.000.000	100	0	0	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	25.000.000	24.990.000	99,84	10.000	0,10	
	1053.009	Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	13.000.000	13.000.000	100	0	0	
JUMLAH			157.000.000	156.957.000	99,93	93.000	0,07	
H. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	98.200.000	98.200.000	100	0	0	
	1053.001	Pembebasan Biaya Perkara	10.500.000	10.500.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	75.000.000	75.000.000	100	0	0	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	12.700.000	12.700.000	100	0	0	
JUMLAH			98.200.000	98.200.000	100	0	0	
I. PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100.100.000	99.660.000	99,56	440.000	0,44	
	1053.001	Pembebasan Biaya Perkara	3.500.000	3.500.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	85.000.000	84.560.000	99,48	440.000	0,52	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	11.600.000	11.600.000	100	0	0	
JUMLAH			100.100.000	99.660.000	99,56	440.000	0,44	

J. PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	111.850.000	111.850.000	100	0	0	
	1053.003	Pembebasan Biaya Perkara	5.250.000	5.250.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	85.000.000	85.000.000	100	0	0	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	11.600.000	11.600.000	100	0	0	
JUMLAH			111.850.000	111.850.000	100	0	0	
K. PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.003	Pembebasan Biaya Perkara	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	-	-	-	-	-	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	
JUMLAH			1.750.000	1.750.000	100	0	0	
L. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.003	Pembebasan Biaya Perkara	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	-	-	-	-	-	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	
JUMLAH			1.750.000	1.750.000	100	0	0	
M. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.003	Pembebasan Biaya Perkara	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	-	-	-	-	-	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	
JUMLAH			1.750.000	1.750.000	100	0	0	
N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1.750.000	1.750.000	100	0	0	

	1053.003	Pembebasan Biaya Perkara	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	-	-	-	-	-	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	
JUMLAH			1.750.000	1.750.000	100	0	0	
O. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II								
I.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.003	Pembebasan Biaya Perkara	1.750.000	1.750.000	100	0	0	
	1053.004	Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan	-	-	-	-	-	
	1053.005	Layanan Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	
JUMLAH			1.750.000	1.750.000	100	0	0	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Berikut ini adalah rekap pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 :

Tabel 4.2. Matriks Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	1	
7	Ruang Perpustakaan	1	
8	Aula	1	
9	Ruang Server	1	
10	Ruang Bendahara	1	
11	Ruang Kabag Umum Dan Keuangan	1	
12	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	
13	Ruang Kasubag Tata Usaha & Rumah Tangga	1	
14	Ruang Kasubag Rencana Program dan Anggaran	1	

15	Ruang Panitera Pengganti	2	
16	Ruang Panmud Hukum	1	
17	Ruang Pelayanan Hukum	1	
18	Ruang Kasubag Keuangan & Pelaporan	1	
19	Tempat Ibadah	1	
20	Ruang Korwil	1	
21	Ruang Panmud Banding	1	
22	Ruang Sespri	1	
23	Ruang Rapat	1	
24	Ruang Kepegawaian Dan Perencanaan	1	
25	Ruang Umum	1	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Ketik Listrik	2	
2	Mesin Foto Copy Folio	1	
3	Lemari Besi/Metal	4	
4	Lemari Kayu	30	
5	Rak Kayu	14	
6	Filing Cabinet Besi	21	
7	Brandkas	1	
8	Tabung Pemadam Api	7	
9	CCTV	33	
12	Alat Penghancur Kertas	1	
13	Mesin Absensi	6	
14	LCD Projector/Infocus	3	
15	Meja Kerja Kayu	166	
16	Kursi Besi/Metal	183	
17	Kursi Kayu	23	
18	Sice	11	
19	Meja Rapat	14	
20	Meja Komputer	6	
21	Meja Resepsionis	5	
22	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	
23	Alat Pembersih Lainnya	2	
24	AC Window	45	
25	Televisi	5	
26	Ampifier	3	
27	Loudspeaker	18	
28	Sound System	1	
29	Wireless	3	
30	Microphone	1	
31	Microphone Table Stand	1	
32	Unit Power Suply	13	
33	Audio Mixing Portable	2	

34	Microphone/Wireless Mic	1	
35	Video Mixer	1	
36	Camera Digital	2	
37	Telephone PABX	1	
38	Handy Talky (HT)	2	
39	Facsimile	1	
40	Local Area Network (LAN)	1	
41	Internet	2	
42	Komputer Server	1	
43	P.C. Unit	43	
44	Lap Top	34	
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52	
46	Scanner (Peralatan PC)	3	
47	Server	8	
48	Rak Server	1	
49	Portable generating Set	1	
50	Stationary generating Set	1	
60	Sedan	3	
61	Jeep	1	
62	Station Wagon	1	
63	Mini Bus (Penumpang 14 org Kebawah)	1	
64	Sepeda Motor	8	
65	Mobile File	2	
66	Lemari Display	1	
67	Papan Pengumuman	1	
68	Perkakas Kantor Lainnya	37	
69	Tempat tidur Kayu	3	
70	Kasur/ Springbed	1	
71	Sketsel	3	
72	Meja Makan Kayu	1	
73	Pot Bunga	2	
74	Partisi	2	
75	Nakas	2	
76	Mesin cuci	1	
77	Lemari Es	3	
78	A.C Split	30	
79	Kompor Gas	2	
80	Rice cooker	1	
81	Kitchen Set	3	
82	Amplifier	3	
83	Tiang Bendera	1	
84	Tangga Aluminium	1	
85	Mimbar/Podium	1	

86	Lambang Instansi	1	
87	Karpet	9	
88	Gordyin/Kray	3	
89	DVD Player	2	
90	UPS	5	
91	LCD Monitor	1	
92	Intermedia telephone/Key Telephone	2	
93	Change Over Switch	2	
94	Komputer Jaringan Lainnya	1	
95	CPU	1	
96	Rak Server	1	
97	Peralatan Jaringan Lainnya	1	
98	Piala	3	
99	Buku Lainnya	137	
100	Alat Musik Modern/Band	1	
101	Lukisan Lainnya	2	
102	Maket Miniatur/Replika	1	
103	Papan Visual/Papan Nama	24	
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	4	
7	Ruang Panitera Pengganti	1	
8	Ruang Panitera Muda	3	
9	Ruang JS/JSP	1	
10	Ruang Kasubbag	3	
11	Ruang Server	1	
12	Ruang Aula	1	
13	Ruang Perpustakaan	1	
14	Ruang Mediasi	1	
15	Ruang Laktasi	1	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Arsip	1	
18	Ruang Onestop Service	1	
19	Ruang Tunggu Sidang	1	
20	Ruang WC Umum	3	

II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer PC	34	13 buah dalam kondisi rusak berat
2	Laptop	32	5 buah dalam kondisi rusak berat
3	Printer	17	1 buah dalam kondisi rusak berat
4	Infokus / LCD Proyektor	1	Dalam kondisi rusak berat
5	PABX	2	1 dalam kondisi rusak berat
6	AC	43	17 buah dalam kondisi rusak berat
7	Faximili	1	
8	Genset	2	
9	TV	4	
10	CCTV	1	
11	Mesin Antrian	1	Dalam kondisi rusak berat
12	Equalizer	1	
13	Load Speaker	4	
14	Sound System	1	
15	Warlees	2	Dalam kondisi rusak berat (1 Buah)
16	Handy Cam	1	Dalam kondisi rusak berat
17	UPS	5	
18	Digital Running Teks	1	
19	LCD Monitor	2	
20	Audio Converter	1	
21	Charger	3	
22	Scanner	3	
23	Server	3	
24	Router	1	
25	Hub	2	
26	Modem	1	
27	Switch	2	
28	Meja Resepsionis	3	
29	Meja computer	4	
30	Meja rapat	20	18 Dalam kondisi rusak berat
31	Meja kerja kayu	72	50 Dalam kondisi rusak berat
32	Kursi besi/metal	198	109 Dalam kondisi rusak berat

33	Kursi kayu	24	16 Dalam kondisi rusak berat
34	Sice	11	9 Dalam kondisi rusak berat
35	Komputer Jaringan lainnya	1	
36	Rak Server	1	
C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A			
I. Ruang			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	2	
7	Ruang Perpustakaan	1	
8	Ruang Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, staf	1	
9	Ruang Rapat	1	
10	Ruang Mediasi	1	
11	Ruang Kasub Umum Dan Keuangan, Bendahara, Staf	1	
12	Ruang Panitera Pengganti	1	
13	Ruang Panmud Hukum	1	
14	Ruang Panmud Gugatan	1	
15	Ruang Panmud Permohonan	1	
16	Ruang Wapan	1	
17	Ruang Laktasi	1	
18	Ruang Bermain Anak	1	
19	Ruang Tunggu Sidang	1	
20	Ruang Reseptionist	1	
21	Ruang Kepegawaian dan Ortala dan staf	1	
22	Ruang Server	1	
23	Ruang Tunggu Panitera Pengganti	1	
24	Ruang Pelayanan/ Onestop servis	1	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Portable Generating Set	1	
2	Pompa Air	3	
3	Stasiun Wagon	1	
4	Lemari Besi	5	
5	Lemari Kayu	20	
6	Brandkas	3	

7	Buffet	1	
8	CCTV	1	
9	Alat Detektor barang terlarang/ x ray	1	
12	Mesin Absensi	1	
13	Perkakas Kantor Lainnya	83	Sudah di lelang, menunggu SK penghapusan
14	Meja kerja Kayu	77	
15	Kursi Besi/ Metal	97	
17	Kursi Kayu	13	Sudah di lelang, menunggu SK penghapusan
18	Sice	7	
19	Bangku Panjang Besi/ Metal	10	
20	Bangku Panjang Kayu	14	
21	Meja Rapat	2	
22	Tempat Tidur Kayu	1	
24	Meja Resepsionis	2	
30	Kasur/ Springbed	4	
32	Meja Makan Kayu	1	
34	Meubelair Lainnya	14	
38	Lemari Es	1	
39	AC Split	19	
40	Kipas Angin	5	
41	Kompor Gas (Alat dapur)	1	
42	Tabung gas	1	
43	Televisi	3	
44	Sondsistem	2	
45	Wireless	1	
56	Unit power supplay	1	
57	Gambar presiden/wakil presiden	3	
58	Tiang bendera	6	
59	Kaca hias	5	
60	Dispenser	3	
62	Palu sidang	3	
63	Lambing istansi	1	
64	Gordyn/kray	84	Sudah di lelang,menunggu SKpenghapusan dari MA
66	Telefon/pabx	12	
67	Facsibile	1	

68	Finger printer time and attendance acces control system	1	
69	Alat komunikasi digital dan konvensional lainnya	1	
70	Unintererupted power supply (UPS)	2	
71	Layar proyektor	1	
72	Internet	1	
73	Computer jaringan lainnya	3	
74	P.C unit	21	
75	Lap top	18	
76	Monitor	1	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	
78	Scanner (Peralatan Personal Komper)	3	
79	Server	1	
80	Router	1	
81	Peralatan jaringan lainnya	1	
82	Alat tenis meja	1	
83	Piala	10	

D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B

I. Ruang

1	Ruang ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Wakil Panitera	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Panitera Pengganti	1	
10	Ruang Jurusita Pengganti	2	
11	Ruang Sidang	2	
12	Ruang Pelayanan ptsp	1	
13	Ruang kasir	1	
14	Ruang Mediasi	1	
15	Ruang Rapat	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Lobi	2	
18	Ruang Tunggu	1	
19	Ruang Arsip	1	

20	Ruang Operator	1	
21	Ruang Pantry	1	
22	Ruang Gudang	2	
23	Ruang Laktasi	1	
24	Ruang Posbakum	1	
25	Area Bermain Anak	1	
26	Area Merokok (Smoking Area)	1	
27	Ruang Resepsionis	1	
28	Ruang Informasi	1	
II. Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Ketik	2	
2	Lemari Kayu	16	
3	Filling Kabinet besi	2	
4	Brangkas	2	
5	CCTV	1	
6	Papan Visual>Nama	10	
7	Mesin Absensi	1	
8	Meja Kerja Kayu	33	
9	Kursi Besi/ Metal	152	
10	Kursi Kayu	23	
11	Sice	7	
12	Meja Rapat	4	
13	Meja Komputer	12	
14	Meja Repsesionis	1	
15	Ac Window	1	
16	AC Split	21	
17	Televisi	4	
18	Amplifier	1	
19	Loudspeaker	1	
20	Wireless	1	
21	Tiang Bendera	2	
22	Lambang Instansi	2	
23	Intermedia Telephone	1	
24	UPS	4	
25	Komputer	27	
26	Laptop	17	
27	Sound System	1	
28	Printer	15	

E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	2	
7	Ruang Perpustakaan	1	
8	Ruang IT	1	
9	Ruang Bendahara	1	
10	Ruang Kasubag IT dan Pelaporan	1	
11	Ruang Kasubag Umum & Keuangan	1	
12	Ruang Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1	
13	Ruang Panitera Pengganti	1	
14	Ruang Posbakum	1	
15	Ruang Pelayanan Hukum	1	
16	Tempat Ibadah	1	
17	Ruang Penasehat Hukum	1	
18	Ruang Gudang	1	
19	Ruang Kantin	1	
20	Ruang Laktasi	1	
21	Ruang Tunggu Sidang	1	
22	Toilet	6	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mesin Ketik Listrik	-	
2	Mesin Foto Copy Folio	1	
3	Lemari Besi/Metal	1	
4	Lemari Kayu	26	
5	Rak Kayu	1	
6	Filing Cabinet Besi	-	
7	Brandkas	1	
8	Tabung Pemadam Api	5	
9	CCTV	1	
10	Papan Visual/Papan Nama	3	
11	Mesin Absensi	1	
12	Hand Metal Detector	1	
13	Portable Generating Genset	1	

14	Meja Kerja Kayu	51	
15	Kursi Besi/Metal	92	
16	Kursi Kayu	5	
17	Sice	4	
18	Meja Rapat	5	
19	Meja Komputer	5	
20	Meja Resepsionis	1	
21	Kipas Angin	2	
22	Alat Pembersih Lainnya	3	
23	AC Split	20	
24	Televisi	1	
25	Ampifier	2	
26	Bangku Panjang Kayu	8	
27	Sound System	3	
28	Wireless	2	
29	Microphone	1	
30	Kursi Fiber Glas/Plastik	45	
31	Unit Power Suply	1	
32	Lemari Es	3	
33	Microphone/Wireless Mic	2	
34	Hub	1	
35	Router	1	
36	Telephone PABX	1	
37	Pesawat Telephone	5	
38	Handy Talky (HT)	3	
39	Facsimile	1	
40	Local Area Network (LAN)	3	
41	Internet	2	
42	Komputer Server	4	
43	P.C. Unit	19	
44	Lap Top	17	
45	Desk Info	1	
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	
47	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	

48	Server	3	
49	Rak Server	1	
F.	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B		
I.	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	2	
7	Ruang Perpustakaan	1	
8	Ruang IT	1	
9	Ruang Bendahara dan PPK	1	
10	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	
11	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	1	
12	Ruang Kasubag, Perencanaan, IT dan Pelaporan	1	
13	Ruang Panitera Pengganti	1	
14	Ruang Panitera Muda	1	
15	Ruang Onestop service	1	
16	Mushala	1	
17	Ruang Rapat	1	
18	Ruang Posbakum	1	
19	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	
20	Ruang Arsip	1	
21	Ruang Mediasi	1	
22	Ruang Tunggu	1	
23	Ruang resepsionis	1	
24	Ruang Jurusita	1	
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer (PC)	13	
2	Server	2	
3	Faximile	1	
4	Laptop	19	
5	Router	1	
6	Televisi	1	
7	Printer + Copy + Scanner	11	
8	Finger Scan (mesin absensi)	1	
9	Generator	1	

12	CCTV	8	
13	Wireless	1	
14	Infocus + Layar	1	
15	Meja Sidang	2	
16	Kursi Hakim/ PP	8	
17	Bendera	2	
18	Kursi Pihak	6	
19	Kursi besi/metal	119	
20	Palu Sidang	2	
21	Alquran	2	
22	mesin faximile	1	
23	Server Internet	2	
24	Wifi Indihome	2	
25	Laptop	1	
26	Printer+Scan+Mesin Fotocopy	1	
27	Televisi	2	
28	CCTV	8	
29	Handycam	-	
30	Infocus	2	
31	UPS	3	
32	Monitor	3	
33	Power suplay	3	
G. PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	2	
7	Ruang Perpustakaan Dan TI	1	
8	Ruang Bendahara	1	
9	Ruang Kepaniteraan	1	
10	Ruang Kesekretariataan	1	
11	Ruang Kasubbag TI	1	
12	Ruang Kordinator Lantai I	1	
13	Ruang Kordinator Lantai II	1	
14	Ruang One Stop Service	1	

15	Ruang Mediasi Dan Advokat	1	
16	Ruang Tunggu Sidang	1	
17	Ruang Gudang	1	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Tower crane	3	Baik
2	Portabel generating set	1	Baik
3	Stationary water pump	2	Baik
4	Meja kerja kayu	48	Baik
5	Meja computer	2	Baik
	Meja computer	5	Rusak Berat
6	Meja resepsionis	1	Baik
	Meja resepsionis	1	Rusak Berat
7	Lemari kayu	19	Baik
8	Sice	6	Baik
	Sice	2	Rusak Berat
9	Kursi besi/metal	71	Baik
	Kursi besi/metal	23	Rusak Berat
10	Filing cabinet besi	5	Baik
11	Lambang instansi	2	Baik
12	Kursi kayu	8	Baik
	Kursi kayu	12	Rusak Berat
13	Kursi fiber glas/plastik	6	Rusak Berat
14	Karpet	2	Rusak Berat
15	Lambang garuda	1	Baik
16	Meja telepon	3	Baik
	Meja telepon	1	Rusak Ringan
17	Monografi	4	Baik
18	Buku lainnya	18	Baik
19	Lemari Besi/Metal	5	Baik
20	Kursi Dorong	1	Baik
21	CCTV	1	Baik
III Alat Kantor,Rumah Tangga Dan Perlengkapan Kantor			
1	PC PC	17	Baik
		5	Rusak Berat
2	Lap top	19	Baik
	Lap top	8	Rusak Berat
3	Telephone PABX	1	Rusak Berat
4	Komputer jaringan lainnya	2	Baik
	Komputer jaringan lainnya	3	Rusak Berat
5	Internet	1	Baik

6	Scanner	2	Baik
7	Server	4	Baik
8	Hub	1	Baik
9	Modem	1	Baik
10	External	1	Baik
11	Printer	19	Baik
12	Facsimile	1	Baik
13	Pesawat telephone	14	Rusak Berat
14	AC split AC split	12 3	Baik Rusak Berat
15	Audio mixing portable	2	Baik
16	Digital audio taperecorder	1	Rusak Berat
17	Microphone cabel	2	Baik
18	Compack disk player	6	Baik
19	Wireles Mic	8	Baik
20	Amlpifier	1	Baik
21	Audio Amplifier	1	Baik
22	Palu sidang	3	Baik
23	Brandkas	1	Baik
24	Mesin absensi Mesin absensi	1 1	Rusak Berat Baik
25	Televisi	1	Pihak 3
26	AC Split	9	Pihak 3
27	Software	1	Baik
28	Tiang bendera	2	Rusak Ringan
29	Power Supply	5	Rusak Berat
30	Microphone	1	Baik
31	LCD Proyektor	1	Baik
32	Cable	60	Baik
33	Kaca Hias	2	Baik
34	Dispenser	1	Rusak berat
H. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II			
I. Ruangan			
	BANGUNAN I		
1	Ruang Panitera	2	Lantai 1
2	Ruang Wakil Panitera	2	Lantai 1
3	Ruang IT	1	Lantai 1
4	Ruang Kasubbag. PTIP	1	Lantai 1

5	Ruang Sidang I	1	Lantai 1
6	Ruang Mediasi	1	Lantai 1
7	Ruang Wakil Ketua	2	Lantai 2
8	Ruang Perpustakaan	1	Lantai 2
9	Ruang Sekretaris	2	Lantai 2
10	Ruang Bendahara	1	Lantai 2
11	Ruang Juru Sita / Juru Sita Pengganti	1	Lantai 2
12	Ruang Kasubbag. Kepegawaian	2	Lantai 2
13	Ruang Kasubbag. Umum dan Keuangan	1	Lantai 2
14	Gudang	1	Lantai 2
BANGUNAN II			
1	Ruang Pendaftaran, Meja I, II dan III	2	Lantai I
2	Ruang Panitera Muda dan Panitera Pengganti	1	Lantai I
3	Ruang Sidang II	1	Lantai I
4	Ruang Ketua	2	Lantai 2
5	Ruang Hakim I	2	Lantai 2
6	Ruang Hakim II	2	Lantai 2
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Lemari Besi/Metal	9	
2	Rak Arsip	2	
3	Lemari Kayu	17	
4	Filing Cabinet Besi	10	
5	Brandkas	2	
6	Buffet	1	
7	Mesin Absensi	1	
8	Hand Metal Detector	1	
9	LCD Projector / Infocus	1	
10	Meja Kerja Kayu	39	
11	Kursi Besi/metal	76	
12	Kursi Kayu	19	
13	Sice	4	
14	Bangku panjang kayu	4	
15	Jam Elektronik	5	
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	
17	Mesin Pemotong Rumput	2	
18	Lemari Es	1	
19	AC Split	22	
20	TV	4	
21	Tape Recorder	2	
22	UPS	5	
23	Stabilizer	1	

24	Faximile	1	
25	Komputer Jaringan Lainnya	3	
26	PC Unit	12	
27	Laptop	19	
28	Printer	12	
29	Scanner	4	
30	Server	2	
31	Router	2	
32	Rak Server	1	
33	Genset	1	
34	Buku-buku perpustakaan	1106	
I. PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	1	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Kasir	1	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang IT	1	
12	Ruang Panitera Pengganti	1	
13	Ruang One Stop Service	1	
14	Ruang JS / JSP	1	
15	Ruang Arsip Perkara	1	
16	Mushola	1	
17	Gudang	1	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Meja Kerja Kayu	51	Baik
2	Kursi Kayu	12	9 Baik, 3 Rusak Berat
3	Kursi Besi Metal	81	29 Baik, 3 Rusak Berat
4	Brankas	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
5	Sice	4	Baik
6	Meja Resepsionis	1	Baik
7	Kursi Pelastik	36	Rusak Berat
8	Pot Bunga	1	Rusak Berat
9	Partisi	1	Baik

10	Jam Elektronik	1	Baik
11	Sound System	1	Baik
12	Unit power Supply	2	Rusak Berat
13	Stabilisator	1	Rusak Berat
14	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
15	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
16	Tiang Bendera	3	Baik
17	Kaca Hias	6	Baik
18	Dispenser	6	Rusak Berat
19	Lambang Instansi	2	Baik
20	Karpet	9	1 Baik, 8 Rusak Berat
21	Gordyin/Krai	19	Baik
22	Keset Kaki	1	Rusak Berat
23	Lemari Kayu	9	Baik
24	Rak Kayu	1	Rusak Berat
25	Meja Sidang	1	Baik
26	Meja Pengacara	2	Baik
27	Kursi Pengacara	4	Baik
28	Kursi Hakim/PP	4	Baik
29	Bendera	2	Baik
30	Kursi Pihak	2	Baik
31	Bangku Pengunjung	4	Baik
32	Pagar Pembatas	1	Baik
33	Palu Sidang	1 set	Baik
34	Alquran	1 buah	Baik
35	Filing Kabinet Besi	1	Baik
36	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik
37	White Board	6	Rusak Berat
38	Peta	1	Rusak Berat
39	Perforator Besar	1	Rusak Berat
40	Kotak Surat	2	Baik
41	Perkakas Kantor Lainnya	3	Rusak Berat
42	Komputer Jaringan Lainnya	2	Baik
43	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Baik
44	Alat Tennis Meja	1	Baik
45	Telephon/Mesin Faximile	1	Baik
46	Server	1	Baik
47	Rak Server	1	Baik

48	PC	4	Baik
49	Switch	1	Baik
50	Hub	1	Baik
51	Wifi	2	Baik
52	Modem	2	Baik
53	Laptop	20	18 Baik 2 Rusak Berat
54	Printer	15	10 Baik 5 Rusak Berat
55	TV	5	Baik
56	CCTV	1 set	Baik
57	Kamera	1	Baik
58	Handycam	1	Baik
59	Infocus	1	Baik
60	Scanner	1	Baik
J. PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	1	
7	Ruang Perpustakaan	1	
8	Ruang Bendahara	1	
9	Ruang Umum Dan Keuangan	1	
10	Ruang Perencanaan IT Dan Pelaporan	1	
11	Ruang Kepegawaian Dan Ortala	1	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Lemari Kayu	16	
2	Filing Cabinet Besi	7	
3	Filing Cabinet Kayu	2	
4	Brandkas	1	
5	Tabung Pemadam Api	2	
6	CCTV	1	
7	Mesin Absensi	2	
8	Hand Metal Detector	1	
9	LCD Projector/Infocus	1	
10	Meja Kerja Kayu	26	

11	Kursi Besi/Metal	127	
12	Kursi Kayu	8	
13	Sice	6	
14	Meja Rapat	2	
15	Meja Resepsionis	3	
16	AC split	16	
17	Televisi	1	
18	Power Ampifier	1	
19	Loudspeaker	4	
20	Microphone /Wireless MIC	1	
21	Microphone	2	
22	Kamera	1	
23	Internet	1	
24	P.C. Unit	16	
25	Lap Top	9	
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	
27	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	
28	Server	2	
K. PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Wakil Ketua	1	
2	Ruang Hakim	1	Bergabung
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris	1	
5	Ruang Kasubbag	1	
6	Ruang Server	1	
7	Ruang Arsip Sekretariat	1	
8	Ruang Panitera Muda	1	Bergabung
9	Ruang Panitera Pengganti	1	
10	Ruang JS/JSP	1	
11	Ruang PTSP	1	
12	Ruang Kasir	1	
13	Ruang Sidang	1	
14	Ruang Tunggu Sidang	1	
15	Ruang WC Umum	1	
16	Ruang Perpustakaan	0	
17	Ruang Mediasi	0	
18	Ruang Laktasi	0	

19	Ruang Posbakum	0	
20	Ruang Aula	0	
21	Ruang Arsip Perkara	0	
22	Mushola Al mahkamah	1	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Komputer PC	6	Kondisi Baik
2	Laptop	5	Kondisi Baik
3	Printer	4	Kondisi Baik
4	AC	7	Kondisi Baik
5	Server	1	Kondisi Baik
6	Modem	2	Kondisi Baik
7	Switch Hub	1	Kondisi Baik
8	Meja kerja kayu	8	Kondisi Baik
9	Kursi besi/metal	8	Kondisi Baik
10	Meja Sidang	1	Kondisi Baik
11	Kursi Majelis Hakim	1	Kondisi Baik
L. PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Wakil Ketua	1	
2	Ruang Hakim	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris beserta Kasubag	1	
5	Ruang Sidang	1	
6	Ruang Panitera Muda	1	
7	Ruang IT/server	1	
8	Ruang Pelayanan Hukum	1	
9	Tempat Ibadah	1	
10	Ruang Tunggu Sidang	1	
11	Toilet	2	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Papan Nama	1	
2	Mesin Absensi	1	
3	Meja Kerja Kayu	16	
4	Kursi Besi/Metal	20	
5	Kursi direktur/putar	9	
6	Sice	1	
7	Kipas Angin	4	
8	Alat Pembersih Lainnya	-	

9	AC Split	5	
10	Bangku Panjang	1	
11	Sound System	-	
12	Ups	4	
13	Rak server	1	
14	Hub	1	
15	Router	6	
16	Pesawat Telephone	1	
17	Local Area Network (LAN)	2	
18	Internet	1	
19	Komputer Server	1	
20	P.C. Unit	4	
21	Lap Top	2	
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	
23	Vestouch/kiosk	1	
24	Server	1	
25	Monitor	1	
M. PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Wakil Ketua	1	
2	Ruang Hakim	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris beserta Kasubag	1	
5	Ruang Sidang	1	
6	Ruang Panitera Muda	1	
7	Ruang IT/server	1	
8	Ruang Pelayanan Hukum	1	
9	Tempat Ibadah	1	
10	Ruang Tunggu Sidang	1	
11	Toilet	2	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Pesawat telephone	1	
2	Mesin Absensi	1	
3	Meja Kerja Kayu	13	
4	Kursi Besi/Metal	10	
5	Kursi piber glass/plastik	34	
6	Sice	1	
7	Dispenser	3	

8	Rak server	1	
9	AC Split	6	
10	Jam mekanis	5	
11	Sound System	1	
12	Wireless	5	
13	Microphone	-	
14	Hub	1	
15	Router	1	
16	Pesawat Telephone	1	
17	Local Area Network (LAN)	2	
18	Internet	1	
19	Komputer Server	1	
20	P.C. Unit	3	
21	Lap Top	5	
22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-	
24	Server	2	
25	Switch	1	
26	Lemari kayu	1	
27	Kursi kayu	4	
28	Kasur/springbad	1	
29	Mesin cuci	1	
30	Lemari Es	1	
31	ups	4	
32	Lcd monitor	1	
33	Alat tenis meja	1	
34	Rak besi	3	
35	Alat penyimpanan kantor lainnya	2	
N. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	0	
2	Ruang Panitera	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Sekretaris	0	
5	Ruang Sidang	1	
6	Ruang Perpustakaan Dan TI	0	
7	Ruang Bendahara	0	
8	Ruang Kepaniteraan	1	

9	Ruang Kesekretariatan	1	
10	Ruang Kasubbag TI	0	
11	Ruang Koordinator Lantai I	0	
12	Ruang Koordinator Lantai II	0	
13	Ruang One Stop Service	0	
14	Ruang Mediasi Dan Advokat	0	
15	Ruang Tunggu Sidang	0	
16	Ruang Gudang	0	
17	Ruang Ketua	0	
II. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Ups	4 unit	
2	Rak server	1 unit	
3	Stationary water pump	0 unit	
4	Meja kerja kayu	17 unit	
5	Kursi Direktur Kursi Direktur	8 unit 4 unit	
6	Kursi besi/metal	16 unit	Pihak 3
7	Lambang instansi	1 unit	
8	Kursi kayu	2 unit	Pihak 3
9	Kursi fiber glas/plastic	13 unit	Pihak 3
10	Lambang garuda	1 unit	Pihak 3
11	PC unit	7 Unit	
12	Lap top	5 Unit	
13	Komputer jaringan lainnya	1 Unit	
14	Internet	2 Unit	
15	Scanner	2 Unit	Pihak 3
16	Server	2 Unit	
17	Printer	3 Unit	
18	Facsimile	1 Unit	Pihak 3
19	Pesawat telephone	1 Unit	Pihak 3
20	AC split	6 Unit	
21	Palu sidang	1 Unit	
22	Mesin absensi	1 Unit	
23	Tiang bendera	1 Unit	Rusak ringan
24	Dispenser	2 Unit	Pihak 3
O. PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II			
I. Ruangan			
1	Ruang Ketua	0	
2	Ruang Panitera	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Sekretaris	0	

5	Ruang Sidang	1	
6	Ruang Perpustakaan Dan TI	0	
7	Ruang Bendahara	0	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Kesekretariatan	1	
10	Ruang Kasubbag TI	0	
11	Ruang Kordinator Lantai I	0	
12	Ruang Kordinator Lantai II	0	
13	Ruang One Stop Service	0	
14	Ruang Mediasi Dan Advokat	0	
15	Ruang Tunggu Sidang	0	
16	Ruang Gudang	0	
17	Ruang Ketua	0	
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Pompa air	1 unit	
2	Mesin Absensi	1 unit	
3	Ac split	5 unit	
4	Meja kerja kayu	13 unit	
5	Lemari kayu	-	
6	Kursi besi/metal	9 unit	Pihak 3
7	Peralatan jaringan lainnya	1 unit	
8	Kursi kayu	4 unit	Pihak 3
9	Kursi fiber glas/plastic	-	
10	Lambang garuda	-	
11	PC unit	3 Unit	
12	Lap top	5 Unit	
13	Komputer jaringan lainnya	1 Unit	
14	Palu sidang	2 Unit	
15	Scanner		
16	Server	2 Unit	
17	Power suplay	1 Unit	
18	Gambar presiden/wakil presiden	2 Unit	
19	Printer	3 unit	

Tabel 4.3. Matriks Kendaraan Dinas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Camry	2018				
2.	Fortuner	2018				
3.	Sedan Altis	2014				
4.	Sedan Altis	2006				
5.	Innova G	2013				
6.	Vios	2012				
7.	Grand Livina	2011				
8.	Avanza	2005				
9.	Terrano	2004				
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Tiger 6672	2007				
2.	Honda Tiger 6673	2007				
3.	Honda Tiger 6675	2007				
4.	Honda Tiger 6679	2007				
5.	Honda Tiger 6676	2007				
6.	Honda Tiger 6671	2007				
7.	Honda Tiger 3304	2007				
8.	Honda Tiger 6674	2007				
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A						
I.	KENDARAAN RODA 4					
1.	Sedan Altis	2008				BE 7 A
2.	Kijang Innova E	2015				BE 2360 BZ
3.	Kijang Innova E	2005				BE 2195 BZ
4.	Daihatsu Terrios	2014				BE 2275 BZ
II.	KENDARAAN RODA 2					
1.	Honda Tiger	2007				BE 6671 BZ
2.	Honda Tiger	2008				BE 7269 BZ
3.	Honda Tiger	2008				BE 7268 BZ

C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Innova Tipe E	2006				
2.	Innova Tipe G	2006				Pinjam Pakai Dari Pemda Kota Metro
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	GLP III Mega Pro	2005				
D. PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Kijang Innova	2006				
2.	Grand Livina	2011				
3.	Toyota Kijang Innova	2017				
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda GL Pro	2006				
2.	Honda Tiger	2008				
3.	Honda Tiger	2008				
E. PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Kijang Innova E	2006				
2.	Isuzu	2011				
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda GLP III	2005				
F. PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mobil Kijang Inova	2006				Dropping MA RI
2.	Mobil Kijang Inova	2016				Pinjam Pakai dari Pemkab tanggamus
3.	Mobil Sedan Altis	2016				Hibah MA RI
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda GLP Pro	2005				
2.	Honda Tiger	2007				
3.	Honda Tiger	2007				
4.	Honda Tiger	2007				
5.	Honda Tiger	2007				

G. PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Rush	2015				
2.	Toyota Avanza Tipe G Luxury	2015				
3.	Kijang Innova Type E	2006				
4.	Toyoya Kijang Type LX	2004				
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Suzuki Type Smas 115 cc	2010				
2.	Suzuki Type Shogun 125 cc	2007				
H. PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Innova	2006				Transfer dari MARI Tahun 2006
2.	Toyota Innova	2006				Pinjam Pakai dari Pemda Tulang Bawang
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Mega Pro	2005				ABT 2005
2.	Honda Tiger	2006				DIPA 2007
3.	Honda Tiger	2007				Pinjam Pakai dari PTABandar Lampung
I. PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Toyota Innova G	2006				Operasional Ketua
2	Toyota Avanza	2015				Operasional Wakil Ketua
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Mega Pro	2005				Operasional Umum
2	Honda Mega Pro	2005				Operasional Umum/ Pinjam Pakai PTA Bandar Lampung
J. PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II						
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Innova E	2006				
2.	Avanza	2013				
3.	Isuzu Fanther	2003				

II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra Fit	2004				
2.	Honda Megapro	2005				
3.	Honda Tiger	2008				
4.	Honda Tiger	2008				
5.	Yamaha Yupiter Mx	2011				
K.	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II					
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota New Rush	2019				DIPA 2019
2.	Toyota Innova	2011				Pinjam Pakai
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Yamaha Vixion	2019				DIPA 2019
2.	Yamaha Mio M3	2019				DIPA 2019
L.	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II					
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Avanza	2018				Pinjam Pakai Pemda
2.	Toyota Rush	2019				DIPA 2019
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Vario	2019				DIPA 2019
2.	Honda Vario	2019				DIPA 2019
M.	PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II					
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Rush	2019				DIPA 2019
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Vario 150 CC	2019				DIPA 2019
2.	Honda Vario 125 CC	2019				DIPA 2019
N	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II					
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Daihatsu Terios	2010				Pinjam Pakai Pemda TUBABA
2.	Toyota New Rush	2019				DIPA 2019
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Yamaha Aerox	2019				DIPA 2019
2.	Yamaha Aerox	2019				DIPA 2019

O	PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II					
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Rush 1,5 S M/T	2019				DIPA 2019
2.	Innova Tipe G	2010				Pinjam Pakai Pemda LAMTIM
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Yamaha Aerox 155 CC	2018				DIPA 2019
2.	Yamaha Soul 125 CC	2018				DIPA 2019

Tabel 4.4. Matriks Rumah Dinas di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
A. PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG						
1.	Rumah Dinas Ketua	1				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1				
3.	Rumah Dinas Hakim	2				
4.	Rumah Dinas Panitera	1				
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1				
B. PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS I A						
NIHIL						
C. PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A						
1.	Rumah Dinas Ketua	1				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1				
3.	Rumah Dinas Hakim	1				

D.	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS I B					
1.	Rumah Dinas Ketua	1				
2.	Rumah Dinas Hakim	2				
3.	Rumah Dinas Wakil Panitera	1				
4.	Rumah Dinas Kasubag	1				
E.	PENGADILAN AGAMA KALIANDA KELAS I B					
NIHIL						
F.	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS KELAS I B					
NIHIL						
G.	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II					
NIHIL						
H.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG KELAS II					
1.	Rumah Dinas Ketua	1				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1				
3.	Rumah Dinas Hakim	2				
4.	Rumah Dinas Panitera	1				
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1				
I.	PENGADILAN AGAMA KRUI KELAS II					
1	Rumah Dinas Ketua	1				Tipe 70
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1				Tipe 70
4	Rumah Dinas Paniterap	1				Tipe 54
5	Rumah Dinas Sekretaris	1				Tipe 54

J.	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU KELAS II					
1.	Rumah Dinas Ketua	1				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1				
4.	Rumah Dinas Panitera	1				
K.	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN KELAS II					
NIHIL						
L.	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II					
NIHIL						
M.	PENGADILAN AGAMA MESUJI KELAS II					
NIHIL						
N.	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH KELAS II					
NIHIL						
K.	PENGADILAN AGAMA SUKADANA KELAS II					
NIHIL						

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG

E-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Dengan kata lain, pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI, tercakup layanan sebagai berikut dan bisa diakses di situs ecourt.mahkamahagung.go.id:

- a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
- d. E-Litigation (Persidangan secara Online)

a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online saat ini dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar, setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi tempat di mana advokat disumpah. Adapun pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut.

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI.

b. Taksiran Panjar Biaya (E-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-Skum) dan nomor pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (multichannel) yang tersedia.

Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-Skum), pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.

c. Pemanggilan Pihak secara Online (E-Summons)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.

d. Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik.

Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan, yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

e. e-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-court, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara.

Pengadilan Agama di Wilayah Lampung telah 100% mengimplementasikan e-court (meliputi 14 Pengadilan Agama). Seluruhnya telah melakukan aktivasi akun, memperbaiki data radius, dan telah melakukan setting data pengadilan. Adapun implementasi e-court pada Pengadilan Agama sewilayah Lampung, posisi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN AGAMA	KLAS	PENDAFTARAN (DIBAYAR)	BERHASIL NO PERKARA	GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PA TANJUNG KARANG	IA	35	33	33	0	0
2	PA METRO	IA	186	185	173	0	12
3	PA TANGGAMUS	IB	68	64	63	0	1
4	PA GUNUNG SUGIH	IB	285	285	283	0	2
5	PA KALIANDA	IB	195	194	195	0	0
6	PA KOTABUMI	II	38	38	38	0	0
7	PA TULANG BAWANG	II	29	29	29	0	0
8	PA KRUI	II	2	2	2	0	0
9	PA BLAMBANGAN UMPU	II	62	61	61	0	0
10	PA SUKADANA	II	359	354	351	1	2
11	PA GEDONG TATAAN	II	159	159	157	0	2
12	PA PRINGSEWU	II	43	43	42	0	1
13	PA TULANG BAWANG TENGAH	II	36	36	36	0	0
14	PA MESUJI	II	10	10	10	0	0
TOTAL			1507	1493	1473	1	20

Tabel 4.5. Implementasi E-court Posisi 31 Desember 2019

NO	SATKER	JUMLAH PERKARA (siswa perkara 2018 + perkara msk 2019)	JUMLAH PERKARA ECOURT	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	PA TANJUNG KARANG	2.274	33	1.5%
2	PA METRO	745	185	24.8%
3	PA TANGGAMUS	1.964	63	3.3%
4	PA GUNUNG SUGIH	2.480	284	11.5%
5	PA KALIANDA	1.964	194	9.9%

6	PA KOTABUMI	1.493	38	2.5%
7	PA TULANG BAWANG	686	29	4.2%
8	PA KRUI	1.051	2	0.2%
9	PA BLAMBANGAN UMPU	688	61	8.9%
10	PA SUKADANA	2.463	354	14.4%
11	PA GEDONG TATAAN	629	158	25.1%
12	PA PRINGSEWU	1.114	43	3.9%
13	PA TULANG BAWANG TENGAH	526	36	6.8%
14	PA MESUJI	454	10	2.2%
TOTAL		16,051	1,490	9.283%

Tabel 4.6. Persentase Implementasi E-Court terhadap jumlah perkara

Kendala Dalam Pelaksanaan Ecourt yang dialami oleh satuan kerja sewilayah lampung diantaranya :

1. Untuk wilayah satuan kerja yang susah sinyal, masyarakat masih enggan menggunakan e-court, sehingga sementara ini baru advokat saja yang aktif mendaftar perkara melalui e-court;
2. Notifikasi tagihan pembayaran panjar biaya perkara ke Bank memerlukan waktu yang cukup lama;
3. Tidak muncul lagi notifikasi di SIPP saat ada yang mendaftar e-court;
4. Advokat/pendaftar e-court tidak dapat melakukan edit jenis perkara, sehingga apabila perkara tersebut sudah masuk, harus melakukan permohonan pencabutan perkara tersebut dahulu secara berjenjang dari satker lalu ke tingkat banding hingga ke admin pusat.

2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG.

Implementasi SIPP di Peradilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sudah berjalan lancar. Setiap user aktif menginput SIPP sesuai kewenangannya. Di sisi aplikasi, SIPP di Peradilan Agama sewilayah sudah terinstal Versi terbaru 3.20 seluruhnya.

Implementasi SIPP pada pengadilan tingkat pertama secara berkala dievaluasi dan dimonitoring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dipublikasikan pada website resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Berikut Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan pada Pengadilan Agama di wilayah Lampung per 31 Desember 2019 :

Tabel 4.7. Implementasi SIPP pada Pengadilan Agama Sewilayah Lampung¹

NO	SATKER	USER		BEBAN PERKARA/ PUTUS/ BEBAN MINUTASI/ MINUTASI	UPLOAD PUTUSAN	PERSENTASE	KINERJA IMPLEMENTASISIPP
1	2	3		4	5	6	7
1	PA TANJUNG KARANG	Ketua	1	2274 2003 2017 201	SISA:	PROSES :	89,26%
		Wakil	0		1086	62,82%	
		Hakim	11		UPLOAD TAHUN INI: 1979	WKT PUTUS:	
		Kepaniteraan	24			72,31%	
				WKT MINUTASI:	96,86%		
				UPLOAD:	98,80%		
2	PA METRO	Ketua	1	745 740 740 740	SISA:	PROSES :	89,26%
		Wakil	0		0	64%	
		Hakim	5		UPLOAD TAHUN INI: 743	WKT PUTUS:	
		Kepaniteraan	15		82,72%		
				WKT MINUTASI:	100%		
				UPLOAD:	100.41%		

NO	SATKER	USER		BEBAN PERKARA/ PUTUS/ BEBAN MINUTASI/ MINUTASI	UPLOAD PUTUSAN	PERSENTASE	KINERJA IMPLEMENTASISIPP
1	2	3		4	5	6	7
3	PA TANGGAMUS	Ketua	1	1297 1264 1265 1265	SISA: 12 UPLOAD TAHUN INI: 1233	PROSES : 64,40% WKT PUTUS: 82,94% WKT MINUTASI: 100% UPLOAD: 97,55%	93,50%
		Wakil	1				
		Hakim	4				
		Kepaniteraan	15				
4	PA GUNUNG SUGIH	Ketua	1	2481 2402 2402 2402	SISA: 3 UPLOAD TAHUN INI: 2399	PROSES : 58,26% WKT PUTUS: 82,26% WKT MINUTASI: 99,91% UPLOAD: 99,88%	94,01%
		Wakil	1				
		Hakim	4				
		Kepaniteraan	10				
5	PA KALIANDA	Ketua	1	1964 1836 1836 1836	SISA: 1270 UPLOAD TAHUN INI: 1836	PROSES : 61,36% WKT PUTUS: 75,71% WKT MINUTASI: 99,84% UPLOAD: 100%	91,85%
		Wakil	1				
		Hakim	3				
		Kepaniteraan	12				
6	PA KOTABUMI	Ketua	1	1493 1385 1385 1385	SISA: 1270 UPLOAD TAHUN INI: 1836	PROSES : 61,36% WKT PUTUS: 75,71% WKT MINUTASI: 99,84% UPLOAD: 100%	91,85%
		Wakil	1				
		Hakim	2				
		Kepaniteraan	6				
7	PA TULANG BAWANG	Ketua	1	686 651 651 651	SISA: 87 UPLOAD TAHUN INI: 630	PROSES : 65,90% WKT PUTUS: 88,33% WKT MINUTASI: 100% UPLOAD: 96,77%	95,03%
		Wakil	1				
		Hakim	2				
		Kepaniteraan	10				



NO	SATKER	USER		BEBAN PERKARA/ PUTUS/ BEBAN MINUTASI/ MINUTASI	UPLOAD PUTUSAN	PERSENTASE	KINERJA IMPLEMENTASISIPP
1	2	3		4	5	6	7
8	PA KRUI	Ketua	1	1050 966 966 963	SISA: 178	PROSES : 75,54%	92,73%
		Wakil	1		UPLOAD TAHUN INI: 925	WKT PUTUS: 83,47%	
		Hakim	2			WKT MINUTASI: 98,97%	
		Kepaniteraan	7			UPLOAD: 95,76%	
9	PA BLAMBANGAN UMPU	Ketua	1	688 634 634 634	SISA: 1270	PROSES : 70,52%	92,73%
		Wakil	1		UPLOAD TAHUN INI: 1836	WKT PUTUS: 89,47%	
		Hakim	1			WKT MINUTASI: 99,84%	
		Kepaniteraan	10			UPLOAD: 100,16%	
10	PA SUKADANA	Ketua	1	2373 2234 2234 2234	SISA: 0	PROSES : 56,18%	89,91%
		Wakil	1		UPLOAD TAHUN INI: 2234	WKT PUTUS: 69,79%	
		Hakim	6			WKT MINUTASI: 99,94%	
		Kepaniteraan	14			UPLOAD: 100%	
11	PA GEDONG TATAAN	Ketua	1	629 604 604 604	SISA: 1270	PROSES : 58,69%	90,70%
		Wakil	1		UPLOAD TAHUN INI: 1836	WKT PUTUS: 75,64%	
		Hakim	2			WKT MINUTASI: 96,46%	
		Kepaniteraan	7			UPLOAD: 100%	
12	PA PRINGSEWU	Ketua	1	1108 1029 1030 1030	SISA: 1270	PROSES : 69,96%	89,82%
		Wakil	1		UPLOAD TAHUN INI: 1836	WKT PUTUS: 76,87%	
		Hakim	2			WKT MINUTASI: 93,75%	
		Kepaniteraan	8			UPLOAD: 98,83%	



NO	SATKER	USER		BEBAN PERKARA/ PUTUS/ BEBAN MINUTASI/ MINUTASI	UPLOAD PUTUSAN	PERSENTASE	KINERJA IMPLEMENTASISIPP
1	2	3		4	5	6	7
13	PA TULANG BAWANG TENGAH	Ketua	1	526	SISA: 1270 UPLOAD TAHUN INI: 1836	PROSES : 61,40% WKT PUTUS: 85,52% WKT MINUTASI: 99,85% UPLOAD: 100,19%	95,18%
		Wakil	1	521			
		Hakim	2	521			
		Kepaniteraan	6	518			
14	PA MESUJI	Ketua	1	454	SISA: 1270 UPLOAD TAHUN INI: 1836	PROSES : 74,94% WKT PUTUS: 89,13% WKT MINUTASI: 96,63% UPLOAD: 100%	95,25%
		Wakil	1	427			
		Hakim	2	427			
		Kepaniteraan	6				

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mendapatkan predikat *A Excellent* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) serta 13 Satuan Kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah mendapatkan penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), yakni 13 Pengadilan Agama mendapatkan predikat *A Excellent* dan 1 Pengadilan Agama mendapatkan predikat B. Pengadilan Agama tersebut telah mengimplementasikan pelayanan prima, inovasi dan telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

**Tabel 5.1. Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sewilayah
PTA Bandar Lampung**

NO	SATKER	PREDIKAT SAPM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PTA Bandar Lampung	<i>A Excellent</i>	Surveillance I Bulan Juni 2019
2	PA Tanjung Karang Kelas I A	<i>A Excellent</i>	Surveillance I Bulan Juli 2019
3	PA Metro Kelas I A	<i>A Excellent</i>	Surveillance I Bulan Juli 2019
4	PA Gunung Sugih Kelas I B	<i>A Excellent</i>	Surveillance I Bulan Juli 2019
5	PA Kalianda Kelas IB	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
6	PA Tanggamus Kelas IB	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
7	PA Kotabumi Kelas II	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
8	PA Tulang Bawang Kelas II	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
9	PA Krui Kelas II	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
10	PA Blambangan Umpu Kelas II	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
11	PA Gedong Tataan	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
12	PA Pringsewu	<i>A Excellent</i>	Surveillance II Bulan November 2019
13	PA Sukadana	B	Surveillance II Bulan November 2019

14	PA Tulang Bawang Tengah	A Excellent	Surveillance II Bulan November 2019
15	PA Mesuji	A Excellent	Surveillance II Bulan November 2019

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).

Tabel 5.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung

No	Satker	CAPAIAN IMPLEMENTASI PTSP							Capaian akhir/ Kategori	Kendala yang dihadapi
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Pengadilan Agama Tanjung Karang	30	95	30	40	5	20	30	86 A	1. Belum ada Bank terintegrasi SIPP 2. Belum ada Kantor Pos Terintegrasi SIPP 3. Permasalahan ada MoU pada Tingkat Pusat terkait dua hal tersebut di atas 4. Anggaran PTSP tidak ada pada DIPA
2	Pengadilan Agama Metro	30	100	25	50	30	20	30	98 A	1. Sudah tersedia tempat untuk layanan Bank dan POS namun pihak terkait sulit untuk menempatkan pegawainya di PTSP.
3	Pengadilan Agama Kalianda	25	80	25	30	10	20	30	76 A	1. Ruang PTSP Tidak Begitu Luas Sehingga Para Masyarakat Yang Ingin Mencari informasi baik Tentang Proses

										Berperkara,Biaya Perkara atau Prosedur Pengaduan di Pengadilan Agama Kalianda Terlihat Padat.
4	Pengadilan Agama Tanggamus	30	100	30	50	20	20	30	97 A	Kekurangan SDM
5	Pengadilan Agama Gunung Sugih	30	90	0	50	20	20	30	83 A	TV Media, Antrian Sidang, Layanan POS dan Aplikasi CCTV masih dalam On Proses.
6	Pengadilan Agama Kota Bumi	25	80	30	50	20	20	15	83 A	1.Kurang luasnya ruang PTSP 2. Kurangnya sarana prasarana 3. Anggaran untuk PTSP terbatas
7	Pengadilan Agama Tulang Bawang	25	90	20	40	20	20	30	84 A	Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk menunjang PTSP
8	Pengadilan Agama krui	20	85	15	40	10	15	30	74 A	Masih Kurangnya personil (SDM) yang mengelola PTSP serta sarana dan Prasarana pendukung PTSP dan tata letak PTSP yang belum sesuai dikarenakan luas kantor yang terbatas dan tidak tersedia anggaran dalam DIPA untuk renovasi ruangan PTSP
9	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	30	100	30	50	25	20	30	98 A	Layanan PT. POS Belum bisa diintegrasikan di PA. Blambangan Umpu karena PT. POS belum merespon dikarenakan

										Jumlah Perkara yang masih relatif sedikit.
10	Pengadilan Agama Gedong Tataan	25	100	0	50	15	20	25	81 A	1. Ruangan PTSP yang belum memadai (sempit) 2. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang 3. Belum adanya sarana Penunjang PTSP berupa : mesin antrian tv media center, cctv
11	Pengadilan Agama Pringsewu	25	80	20	45	5	20	30	78 A	1. Kurangnya sarana dan prasarana 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
12	Pengadilan Agama Mesuji	25	90	0	40	0	15	25	67 B	fasilitas teknologi informasi seperti mesin antrian, CCTV dan TV Media tidak ada, demikian juga dengan PC Unit, Printer, Scanner dirasa masih sangat kurang
13	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	25	85	0	50	0	20	30	72 A	Gedung kantor masih pinjam pakai dari Pemda jadi ruang PTSP masih sangat sempit
14	Pengadilan Agama Sukadana	20	75	10	40	10	15	20	66 B	1. Belum cukupnya sarana dan prasarana terutama Komputer, CCTV, dan printer. 2. Sitem antrian masih manual.

										ruang PTSP masih terlalu sempit. belum adanya AC sehingga ruang PTSP sering panas.
15	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	30	100	30	50	30	20	30	100 A	Minimnya SDM membuat Beban Kerja Petugas PTSP sangat berat, selain harus standby di tempat, mereka j

KETERANGAN :

- 1 : Penempatan dan Desain PTSP
- 2 : Fasilitas PTSP
- 3 : Sarana Penunjang PTSP
- 4 : Layanan Inti PTSP
- 5 : Layanan Pendukung PTSP
- 6 : Prosedur Layanan dalam PTSP
- 7 : Perfoma Petugas PTSP

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Tabel 5.3 Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandar Lampung

No	Nama Satker/ Nama Inovasi/ Pengembang Aplikasi	Deskripsi Singkat	Media Pendukung	Tanggal Pembuatan Tanggal Penerapan
1	PTA Bandar Lampung Aplikasi KINERJA SATKER (KIS) PTA Bandar Lampung	Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah penilaian kinerja satuan kerja.	Komputer Server, PC Client, jaringan lokal/internet	19/04/2019 22-Apr-19

2	PA Kalianda Aplikasi Antrian PTSP Seluruh Jajaran Di Pengadilan Agama Kalianda	Suatu Program/Aplikasi Untuk Memudahkan Para Pengguna Pengadilan Agama Kalianda dalam mendapatkan Pelayanan Yang Ada Di Pengadilan Agama Kalianda Khususnya PTSP yang Meliputi (Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja 1 (Pendaftaran/Kasir), Meja 3 (Pangambilan Produk Pengadilan)	TV Media, Touch screen , PC, Sound System dan Aplikasi Antrian PTSP	08/07/2019 05-Agust-19
3	PA Gedong Tataan Court Self Service PA GEDONG TATAAN	Court Self Service merupakan layanan mandiri yang disediakan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak menggunakan jasa Advokat/ Penasihat Hukum. Pada prinsipnya, layanan ini menyediakan blanko-blanko dokumen berperkara yang dapat digunakan dan dibuat masyarakat secara mandiri selama berperkara di Pengadilan Agama Gedong Tataan ini.	Komputer	01/04/2019 08-Apr-19
4	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Beby Paku PA Tulang Bawang Tengah	Untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan biaya panjar,	Komputer/ Jaringan Internet	09/09/2019 23-Sep-19

BAB VI

PENGAWASAN

1. INTERNAL

Pengawasan Internal dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Ketua yang terdiri atas Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta menilai kinerja. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan dan pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di bawah Koordinator Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan, yaitu:

1. Pengawasan internal Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi yang ditunjuk dengan rincian kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepaniteraan
 1. Manajemen Prosedur Penerimaan Perkara
 2. Administrasi Perkara
 3. Administrasi Persidangan
 - b. Kesekretariatan
 1. Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - a. Inventaris
 - b. Bidang Perpustakaan
 - c. Surat Menyurat
 2. Kepegawaian dan Teknologi Informasi
 3. Perencanaan Program dan Anggaran
 4. Keuangan dan Pelaporan SIMAK BMN
 - a. Keuangan dan Pelaporan
 - b. Bidang SIMAK BMN

2. Pengawasan Pengadilan Agama yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi yang ditunjuk, meliputi 14 (Empat Belas) Pengadilan Agama,yaitu:

- a. Pengadilan Agama Tanjung Karang (KelasIA)
- b. Pengadilan Agama Metro (KelasIA)
- c. Pengadilan Agama Kotabumi (KelasII)
- d. Pengadilan Agama Krui di Liwa (KelasII)
- e. Pengadilan Agama Kalianda (KelasIB)
- f. Pengadilan Agama Tanggamus (KelasIB)
- g. Pengadilan Agama Tulang Bawang (KelasII)
- h. Pengadilan Agama Gunung Sugih (KelasIB)
- i. Pengadilan Agama Blambangan Umpu (KelasII)
- j. Pengadilan Agama Gedong Tataan (Kelas II)
- k. Pengadilan Agama Pringsewu (Kelas II)
- l. Pengadilan Agama Sukadana (Kelas II)
- m. Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah (Kelas II)
- n. Pengadilan Agama Mesuji (Kelas II)

Pengawasan dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan dengan metode Pemeriksaan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, meliputi: Manajemen Peradilan, Teknis Yudisial, Administrasi Kepaniteraan, Adminisitrasi Kesekretariatan.Selama tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melaksanakan Pengawasan/Pemeriksaan sebanyak dua tahap dan pembinaan terhadap Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Bandar lampung pada tahun 2019 telah melakukan Monitoring Pelaksanaan APM dan Kesiapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Setelah Hakim Tinggi Pengawas Melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan baik di Pengadilan Agama maupun di internal Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, secara tim Hakim Tinggi Pengawas menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

2. EVALUASI

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dari kinerja apakah sasaran dan tujuan telah dicapai dengan baik atau belum. Dengan dilaksanakannya evaluasi dapat pula menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja suatu instansi atau lembaga pemerintah, dan menjadi indikator apabila ada keterlambatan atau penyimpangan agar segera diperbaiki.

Evaluasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selain mengkaji mengenai hal-hal yang telah dicapai dan yang belum dicapai, juga mengkaji mengenai kendala yang dihadapi sehingga diharapkan hal-hal yang belum dicapai tersebut dapat segera terselesaikan. Sasaran Kinerja terhadap *Core Business* Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dirumuskan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 yang meliputi area:

1. Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
4. Peningkatan kualitas pengawasan, Peningkatan kualitas SDM;
5. Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana.

Capaian evaluasi dan analisis kendala terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut telah disampaikan secara rinci dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2019. Sebelum dibuatnya suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan laporan evaluasi kinerja akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melakukan berbagai kegiatan evaluasi yang lebih efektif dan berdampak perubahan yakni sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi secara berkala baik perbidang pekerjaan maupun keseluruhan.
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Internal oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Melaksanakan DDTK secara insidentil.
3. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai dan tenaga kontrak.
4. Memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai dalam bentuk Penilaian Prestasi Kerja (PPK).

BAB VII

PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan 14 Pengadilan Agama se-Lampung pada umumnya sudah berjalan dengan cukup baik, namun untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkala dalam hal pembinaan dan pengawasan.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah mencapai 44 perkara sedangkan yang putus sebesar 44 perkara (100 %) sedangkan pada Pengadilan Agama se Lampung jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 16.436 perkara dan jumlah perkara yang putus sebanyak 15.755 perkara sedangkan perkara yang dicabut sebanyak 1.010 perkara.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terhadap Pengadilan Agama se Lampung berjalan dengan baik namun perlu di tingkatkan dari segi kualitas dan kuantitasnya karena baru menjangkau sebagian Pengadilan Agama.
4. Hampir semua Pengadilan Agama se Lampung kekurangan pegawai yaitu untuk tenaga teknis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan staf kesekretariatan dikarenakan banyak nya perkara yang terjadi di wilayah Lampung.
5. Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama (SAPM) telah mengantarkan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memperoleh Setifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai “ A “ Excelent sedangkan 13 Pengadilan Agama di bawahnya mendapatkan dengan nilai “A” Excelent sedangkan 1 Pengadilan Agama seperti Sukadana mendapatkan dengan nilai “B”.
6. Anggaran dan Sarana/Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama se Lampung masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka perlu dilakukan peningkatan kedepannya.

7.2 REKOMENDASI

Adapun rekomendasi dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut ;

1. Perlu diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama se Lampung mengingat volume penambahan pegawai sekarang tidak seimbang dengan volume pegawai yang pensiun dan tingginya jumlah perkara.
2. Untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dibawahnya perlu dialokasikan belanja modal untuk pengadaan tanah, pembebasan lahan serta pembangunan/ perluasan gedung kantor, saran dan prasarananya sesuai urutan prioritas kebutuhan dan anggaran yang ada.
3. Perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan/pengawasan secara berkala atau berkesinambungan kepada unsure pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama se Lampung sehingga dapat terus meningkatkan kinerja dengan baik seperti yang harapkan dengan dukungan anggaran yang memadai.
4. Perlu segera dicanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk pengadilan Agama se Lampung secara keseluruhan melihat Pembangunan Zona Integritas merupakan Program Reformasi Birokrasi.